



UNIVERSITAS INDONESIA

**LOKALISASI KRAMAT TUNGGAK
PADA MASA GUBERNUR ALI SADIKIN: 1971-1977**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**FIKRI
0706279736**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**LOKALISASI KRAMAT TUNGGAK
PADA MASA GUBERNUR ALI SADIKIN: 1971-1977**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**FIKRI
0706279736**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 14 Juli 2011

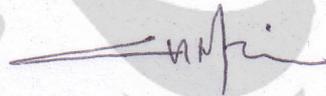
Fikri

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fikri

NPM : 0706279736

Tanda Tangan : 

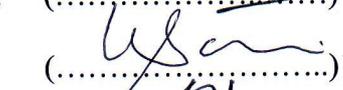
Tanggal : 4 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Fikri
NPM : 0706279736
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Lokalisasi Kramat Tunggak
Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

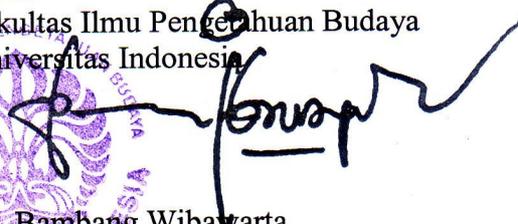
DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji	: Dwi Mulyatari, M.A.	
Pembimbing/Penguji	: Abdurrahman, M. Hum.	
Penguji	: Siswantari, M.Hum.	
Panitera	: Didik Pradjoko, M.Hum.	

Ditetapkan di : Depok
Tanggal :

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196 51023 199003 1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Berkat kasih sayangnya, penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana di Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi rampungnya masa studi yang tepat waktu ini (2007-2011). Rasa terima kasih ini khususnya kepada orang tua laki-laki penulis yang terus membakar semangat penulis untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih pula kepada adik-adik penulis, Furkon, Darsya, dan Bitu, yang telah banyak memberikan bantuan materil. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada adik bungsu penulis yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan keceriaannya.

Dari sisi akademis, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada para dosen Program Studi Ilmu Sejarah yang telah membimbing hingga rampungnya skripsi ini. Terima kasih kepada Tri Wahyuning Mundaryanti, M.Si. yang telah memberikan pemahaman tentang penulisan sejarah sejak semester pertama hingga semester ketujuh pada kelas Bimbingan Bacaan. Terima kasih pula kepada Dr. Magdalia Alfian sebagai dosen Bimbingan Bacaan yang lain yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan tugas akhir penulis. Kepada Abdurrahman, M.Hum. sebagai dosen pembimbing, penulis banyak mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan juga arahnya selama pengerjaan tugas akhir ini, mulai dari kelas Seminar hingga skripsi. Dosen-dosen lain juga sangat berjasa melalui perkuliahan dan diskusi yang mereka berikan selama delapan semester ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua dosen di Program Studi Ilmu Sejarah.

Dalam menjalankan penelitian lapangan, penulis sangat berterima kasih kepada para responden yang bersedia diwawancarai, Bapak Syamsudin, H. Masin, K.H. Harun Al-Rasyid, Bapak Muhammad Suwardi, dan juga Bapak Ramlan Mardjoned. Terima kasih kepada Bapak Zaenal selaku pengurus Perpustakaan PP Muhammadiyah yang sangat membantu penulis dalam mencari referensi tugas akhir ini. Kepada pengurus Perpustakaan FIB UI saya juga sangat berterima kasih

atas pelayanannya yang sangat baik. Terima kasih kepada Gemita Tranka yang telah beberapa kali menjadi teman dalam melakukan penelitian lapangan. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian lapangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Rasa terima kasih juga penulis hantarkan kepada teman-teman Ilmu Sejarah, khususnya teman-teman angkatan 2007 yang telah banyak membantu penulis dengan kebersamaannya. Terima kasih kepada Agung Wibowo teman seangkatan penulis yang telah membantu penulis dalam menemukan narasumber wawancara dan juga atas bantuan lainnya. Sebagai penutup, penulis ucapkan terima kasih pula kepada Fahmi Firmansyah, juga teman seangkatan penulis, yang telah berjasa memberi kemudahan dalam proses wawancara.

Depok, 4 Juli 2011

Fikri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri
NPM : 0706279736
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 14 Juli 2011

Yang Menyatakan

(Fikri)

ABSTRAK

Nama : Fikri
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Lokalisasi Kramat Tunggak
Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977

Skripsi ini bertujuan menggambarkan eksistensi Kramat Tunggak selama periode Gubernur Ali Sadikin dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuannya dengan gaya penulisan naratif deskriptif. Kramat Tunggak adalah lokalisasi prostitusi di Jakarta yang diresmikan pada 1971. Sebagai referensi penulisan, penelitian ini memperolehnya dari buku, dokumen, dan wawancara. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kramat Tunggak bukan hanya sebuah lokalisasi prostitusi tetapi juga berperan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi. Kemudian, keberadaan Kramat Tunggak tidak serta merta menghapus praktek prostitusi di tempat lain. Keberadaan Kramat Tunggak juga mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada pula yang menentangnya.

Kata kunci:
Jakarta, Prostitusi, Lokalisasi, Kramat Tunggak

ABSTRACT

Name : Fikri
Major : Historical Science
Title : Kramat Tunggak in Governor Ali Sadikin's Era: 1971-1977

This Thesis tries to explain about the existence of Kramat Tunggak during Ali Sadikin's era by using the historical method with narrative approach. Kramat Tunggak was a localized area of prostitution which legalized government of Ali Sadikin in 1971. As the references, this thesis used some literature: books, documents, and interviews. The result of this thesis proved that Kramat Tunggak was not only the localization area but also the rehabilitation center. However, Kramat Tunggak did not clearly annihilate a prostitute in another place. In another hand, Kramat Tunggak had earned various opinions: some people agreed with Kramat Tunggak whereas some people not.

Keyword:
Jakarta, Prostitution, Kramat Tunggak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
GLOSARI	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Tinjauan Pustaka	11
1.8. Sistematika Penulisan	12
Bab II Jakarta Tahun 1960-an dan Gubernur Ali Sadikin	13
2.1. Kondisi Umum	13
2.1.1. Pemerintahan	13
2.1.2. Perekonomian	14
2.1.3. Kependudukan	15
2.1.4. Pelayanan Publik	17
2.1.5. Dunia Prostitusi	18
2.2. Rencana Induk Jakarta	21
2.2.1. Rencana Pendahuluan	21
2.2.2. Rencana Induk	25
2.2.3. Anggaran Rencana Induk	26
2.3. Gubernur Ali Sadikin	29
Bab III Lokalisasi Kramat Tunggak	31
3.1. Latar Belakang Lokalisasi	31
3.1.1. Ide Lokalisasi	31
3.1.2. Pemilihan Daerah Kramat Tunggak	35
3.2. Fisik dan Struktur Kramat Tunggak	37
3.3. Aktivitas Kramat Tunggak	42
3.2.1. Sebagai Lokalisasi	42
3.2.2. Sebagai Rehabilitasi dan Resosialisasi	48
3.4. Tanggapan Masyarakat	50
Bab IV Penutup	56
BILBIOGRAFI	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta	16
Tabel 2 : Penerimaan Pajak Judi	28



GLOSARI

- Lokalisasi : tempat pelaku prostitusi dikonsentrasikan
Pengasuh : mucikari yang berada di Kramat Tunggak
Anak asuh : pekerja seks komersil yang berada di Kramat Tunggak
Rehabilitasi : proses pemulihan anak asuh
Resosialisasi : proses persiapan anak asuh untuk terjun kembali ke masyarakat



ABSTRAK

Nama : Fikri
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Lokalisasi Kramat Tunggak
Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977

Skripsi ini bertujuan menggambarkan eksistensi Kramat Tunggak selama periode Gubernur Ali Sadikin dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuannya dengan gaya penulisan naratif deskriptif. Kramat Tunggak adalah lokalisasi prostitusi di Jakarta yang diresmikan pada 1971. Sebagai referensi penulisan, penelitian ini memperolehnya dari buku, dokumen, dan wawancara. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kramat Tunggak bukan hanya sebuah lokalisasi prostitusi tetapi juga berperan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi. Kemudian, keberadaan Kramat Tunggak tidak serta merta menghapus praktek prostitusi di tempat lain. Keberadaan Kramat Tunggak juga mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada pula yang menentangnya.

Kata kunci:
Jakarta, Prostitusi, Lokalisasi, Kramat Tunggak

ABSTRACT

Name : Fikri
Major : Historical Science
Title : Kramat Tunggak in Governor Ali Sadikin's Era: 1971-1977

This Thesis tries to explain about the existence of Kramat Tunggak during Ali Sadikin's era by using the historical method with narrative approach. Kramat Tunggak was a localized area of prostitution which legalized government of Ali Sadikin in 1971. As the references, this thesis used some literature: books, documents, and interviews. The result of this thesis proved that Kramat Tunggak was not only the localization area but also the rehabilitation center. However, Kramat Tunggak did not clearly annihilate a prostitute in another place. In another hand, Kramat Tunggak had earned various opinions: some people agreed with Kramat Tunggak whereas some people not.

Keyword:
Jakarta, Prostitution, Kramat Tunggak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta merupakan sebuah kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa bagian barat. Letaknya yang strategis membuatnya dijadikan sebagai bagian penting bagi hegemoni bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah nusantara. Pada masa Republik Indonesia pun kota ini diposisikan sebagai pusat pemerintahan. Seiring dengan beralihnya kekuasaan, biasanya nama kota ini turut serta berubah, mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga menjadi Jakarta seperti sekarang. Penamaan Jakarta merujuk pada penamaan sebelumnya, yakni Jayakarta. Jaya berarti “kemenangan” dan karta berarti “dalam damai, tidak terganggu”.¹ Dengan berpegangan pada makna kata tersebut, nama Jakarta dapat diartikan kemenangan yang membawa kedamaian.

Lazimnya kota-kota besar, Jakarta memiliki permasalahan yang cukup beragam. Apalagi Jakarta menjadi salah satu pusat perekonomian sekaligus pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan begitu, laju urbanisasi ke Jakarta menjadi tak terelakkan. Masalahnya, tidak semua kaum urban memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di Jakarta. Kaum urban yang tidak mampu bersaing di Jakarta nantinya melahirkan masalah seperti pemukiman kumuh, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, sampai masalah prostitusi.²

Pada awal masa kemerdekaan, Jakarta mengalami situasi yang kurang kondusif untuk melakukan pembangunan. Dilanda gejolak revolusi pada akhir 1940-an yang diwarnai konflik bersenjata dan kemudian memasuki tahun 1950-an serta 1960-an dimana masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin

¹ Kees Grijns dan Peter J. M. Nas (ed.), *Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural (terj.)*. Jakarta: Banana dan KITLV-Jakarta, 2007. Hlm. 226.

² Kuntowijoyo mengutarakan 5 permasalahan perkotaan yang dapat dijadikan objek penelitian ilmu sejarah khususnya sejarah kota, yakni perkembangan ekologi kota, transformasi sosial ekonomis, sistem sosial, masalah sosial, serta mobilitas sosial. Fenomena prostitusi setidaknya terkait dengan transformasi sosial ekonomis dan masalah sosial. Lihat Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah (Edisi ke-2)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003. Hlm. 63-72.

sarat akan perselisihan, membuat kondisi kehidupan masyarakat Jakarta seperti terabaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah daerah Jakarta kurang maksimal dalam menghasilkan pendapatan daerah. Anggaran senilai Rp. 66.000.000 pada 1966 harus mampu mengelola wilayah Jakarta yang mencapai 577 km² dengan jumlah penduduk sekitar 3.060.000 orang.³ Anggaran yang terbatas membuat pembangunan Jakarta berjalan lambat.

Infrastruktur yang ada dianggap tidak bisa melayani kebutuhan penduduknya. Jalan raya mutlak dibutuhkan sebagai penggerak roda perekonomian. Faktanya, kemacetan telah terjadi di Jakarta di 1960-an. Panjang jalan raya yang mencapai 800 km, sebagian besar keadaannya sempit dan rusak, harus melayani jumlah kendaraan yang mencapai 160.000 buah.⁴ Seandainya kendaraan tersebut berada di jalan raya secara bersamaan, tiap kendaraan hanya mampu berjalan dengan kecepatan 5 km per jam. Saat jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari, tentu kemacetan mudah ditemukan di jalan-jalan utama ibukota.

Keterbatasan infrastruktur tersebut masih ditambah oleh arus urbanisasi yang terus menambah beban Jakarta. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada 1961⁵, jumlah penduduk Jakarta 2.906.533 jiwa. Sebagai perbandingan, sebelum Perang Dunia II pemerintah kolonial Belanda memproyeksikan Jakarta untuk melayani 600.000 jiwa.⁶ Melihat angka yang dihasilkan sensus tahun 1961, jelas bahwa Jakarta adalah kota yang kelebihan beban.

Dari jumlah penduduk yang dihasilkan sensus tahun 1961, yang lahir bukan di Jakarta mencapai 1.389.726 jiwa atau 41,8%. Angka ini bisa saja bertambah mengingat 33.575 jiwa lainnya atau 1,2% tidak diketahui tempat lahirnya. Menariknya, setiap provinsi di Indonesia mempunyai “perwakilan” di Jakarta.⁷ Sehingga, setuju atau tidak, Tuhan telah menciptakan manusia Indonesia

³ Ramadhan K. H. (ed), *Bang Ali Demi Jakarta, 1966-1977*. Jakarta: Sinar Harapan, 1992. hlm. 24-25. Menurut hasil sensus, jumlah penduduk Jakarta tahun 1966 sejumlah 3.639.465 jiwa. Perbedaan angka ini mungkin disebabkan data dikeluarkan pada bulan yang berlainan pada tahun yang sama.

⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

⁵ Sensus penduduk tahun 1961 yang dilansir oleh BPS DKI Jakarta.

⁶ Soetjipto Wirosardjono (ed). *Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta, 1977. hlm. 221.

⁷ Lihat Lance Castle, *Profil Emik Jakarta (terj)*. Depok: Masup Jakarta, 2007. hlm. 35-36

di Jakarta karena para pendatang dan penduduk asli membaaur dalam beberapa aktivitas mereka.

Kelebihan beban dan anggaran yang terbatas menjadikan Jakarta kota yang semrawut. Jakarta seperti kampung besar dengan penduduk yang padat dan sekitar 60% penduduk Jakarta tinggal di sana.⁸ Penduduk yang padat menghasilkan kondisi kampung yang buruk. Mereka tinggal di rumah-rumah yang sempit dan lingkungan yang kotor tanpa sarana air, listrik, serta kebutuhan sehari-hari lain yang layak. Selain itu, keberadaan gubuk-gubuk liar menjadi salah satu efek negatif dari urbanisasi. Pada 1966, sekitar 20.000 gelandangan⁹ mendirikan gubuk-gubuk tersebut di sembarang tempat seperti di bantaran kali.

Kondisi seperti di atas adalah kondisi yang dihadapi oleh Ali Sadikin saat diangkat menjadi Gubernur Jakarta pada 1966. Ali Sadikin ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk memimpin Jakarta menggantikan Soemarno Sosroatmodjo. Tepat 28 April 1966, Ali Sadikin dilantik oleh Presiden Soekarno di Istana Negara sebagai Gubernur DKI Jakarta.¹⁰ Tugas yang tidak mudah bagi Ali Sadikin mengingat sejumlah permasalahan Jakarta memerlukan penyelesaian yang cepat dan menyeluruh.

Sebagai upaya membangun Jakarta, Ali Sadikin merujuk kepada Rencana Induk (*Master Plan*) Jakarta. Secara umum, Rencana Induk Jakarta mengatur tentang penggunaan tanah yang meliputi kegunaan untuk tempat tinggal, perkantoran, perindustrian, tempat-tempat rekreasi, dan lain sebagainya.¹¹ Misalnya saja letak wilayah yang diproyeksikan untuk tempat tinggal memiliki jarak yang dekat atau memiliki akses yang mudah dengan perkantoran sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Terkait Rencana Induk, dunia prostitusi di Jakarta ikut pula ditertibkan agar tercipta suatu tata kota yang teratur dan rapi. Tempat-tempat prostitusi di Jakarta pada 1960-an antara lain Boker di Cijantung, di sekitar jalan Kramat Raya,

⁸ Ratu Husmiati, *Ali Sadikin dan Pembangunan Jakarta: 1966-1077. Depok (Tesis):* Fakultas Sastra UI, 2002. hlm. 35.

⁹ *Ibid.* hlm 36.

¹⁰ Ramadhan., *op.cit.*, hlm. 18.

¹¹ Wirosardjono. *op. cit.* hlm. 223.

dan daerah Planet Senen.¹² Berlandaskan Rencana Induk tersebut kemudian titik-titik prostitusi tadi ditertibkan oleh pemerintah daerah dengan jalan mendirikan Lokalisasi Kramat Tunggak.

Lokalisasi Kramat Tunggak merupakan bentuk praktek prostitusi yang dilegalkan dan dikonsentrasikan pada suatu tempat. Kebijakannya ini membuat praktek prostitusi di Jakarta menjadi terkonsentrasi sehingga tidak mudah untuk menemukan pekerja seks komersil berseliweran di pinggir jalan ibu kota. Lokalisasi ini mengharuskan laki-laki yang ingin menggunakan mereka pergi ke Kramat Tunggak. Sehingga, hanya mereka yang benar-benar ingin menggunakan jasa pekerja seks komersil yang pergi ke Kramat Tunggak. Mereka yang memiliki niat setengah-setengah kemungkinan enggan untuk pergi ke sana.

Lokalisasi Kramat Tunggak terletak di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Madya Jakarta Utara. Kramat Tunggak didirikan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur tahun 1970 No. Ca.7/1/13/70 tentang lokalisasi dan resosialisasi pekerja seks komersil.¹³ Letak wilayah ini terpisah dari pemukiman penduduk. Hal ini dimaksudkan agar lokalisasi tidak berdampak buruk terhadap masyarakat. Saat pertama kali berdiri, luas bangunan di lokalisasi mencapai 6,2 hektar.¹⁴ Sementara, luas tanah yang disiapkan untuk lokalisasi mencapai 20 ha.¹⁵ Luas bangunan awal masih sangat mungkin bertambah seiring razia yang dilakukan petugas terhadap para pekerja seks komersil di luar Kramat Tunggak.

Kebijakan Ali Sadikin yang melokalisasi praktek prostitusi di Jakarta tampak kontroversial mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam—Ali Sadikin sendiri beragama Islam. Dalam ajaran Islam, melakukan hubungan badan bukan dengan pasangan yang terikat dengan pernikahan adalah dilarang, apalagi dilokalisasi dan dilegalkan. Tidak hanya agama Islam, agama lain pun melarang tindakan seperti di atas. Ali Sadikin tentu punya argumen kuat untuk

¹² Lihat Ramadhan *op.cit.*, hlm. 205-206. Lihat pula Yuyu Krisna, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996. hlm. 93.

¹³ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁵ Terence Hull dkk., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Harapan, 1997. hlm. 126.

menghadapi orang-orang yang berseberangan dengannya. Yang tidak setuju atas pendirian Kramat Tunggak di antaranya adalah Ikatan Masjid Djakarta.¹⁶

Pendapat masyarakat yang beragam terkait pendirian Lokalisasi Kramat Tunggak ini tentu menarik untuk diungkapkan. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti sikap mereka terkait kebijakan Ali Sadikin tentang Lokalisasi Kramat Tunggak. Lokalisasi sendiri menjadi relevan untuk diterapkan bila ingin menekan terjangkitnya penyakit kelamin dan yang terpenting perdagangan manusia (*trafficking*), khususnya wanita, mengingat praktek prostitusi sulit untuk dihapuskan. Dikatakan sulit dihapuskan karena prostitusi adalah masalah yang rumit. Alasan utama mereka yang terjun ke dunia prostitusi adalah masalah ekonomi. Sementara itu, permintaan atas profesi tersebut akan selalu ada karena berhubungan badan adalah suatu kebutuhan.

Alasan penulis untuk mengangkat tema Lokalisasi Kramat Tunggak adalah sebagai penduduk yang dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, penulis ingin menghasilkan suatu tulisan ilmiah yang berkenaan dengan Jakarta. Selain itu, selalu menarik membahas sesuatu yang terkait dengan Islam dari segi muamalahnya. Dari berbagai bacaan tentang Jakarta, penulis merasa tertarik untuk meneliti kebijakan Gubernur Ali Sadikin terkait Lokalisasi Kramat Tunggak. Kebijakan Ali Sadikin ini penulis anggap akan mempertemukan sejarah Jakarta dengan nilai-nilai Islam melalui boleh tidaknya melokalisasi praktek prostitusi demi pembangunan. Dari kebijakannya terkait Kramat Tunggak ini juga dapat dilihat bahwa seorang pemimpin dituntut untuk membuat suatu keputusan yang cepat dalam keadaan yang mungkin tidak menguntungkan.

Terlebih, penulis sejauh ini belum menemukan tulisan yang membahas tentang Lokalisasi Kramat Tunggak secara komprehensif. Sebelumnya, telah ada Buku *Menyusuri Remang-Remang Jakarta* karya Yuyu Krisna. Buku ini membahas dunia prostitusi di Jakarta sekitar tahun 1970-an. Dalam buku ini, ada bagian yang membahas tentang Lokalisasi Kramat Tunggak. Namun begitu,

¹⁶ Wawancara dengan Ramlan Mardjoned. (usia 68 thn), anggota Ikatan Masjid Djakarta, pada 25 Mei 2011 di Jakarta.

pembahasan tentang Kramat Tunggak tidak terlalu mendetail, mengingat tema yang diangkat adalah dunia prostitusi di Jakarta secara keseluruhan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat pada tulisan kali ini adalah eksistensi Lokalisasi Kramat Tunggak pada masa Gubernur Ali Sadikin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi memiliki arti keberadaan. Mengingat kata eksistensi ini adalah kata serapan dari bahasa asing (*existence*), perlu juga melihat definisi kata ini dalam kamus asing. Menurut Kamus Cambridge, kata *existence* memiliki arti sesuatu atau seseorang yang eksis (*something or someone exist*). Dalam kamus yang sama, kata *exist* memiliki makna hidup (*to live*). Menyimpulkan dari dua kamus beda bahasa tersebut, kata eksistensi dapat diartikan keberadaan, keberlangsungan, sepak terjang. Dengan demikian, maksud kata eksistensi yang digunakan di sini adalah bagaimana bentuk lokalisasi selama Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta dan bagaimana respon masyarakat terhadap lokalisasi tersebut.

Untuk menjawab permasalahan di atas, akan dibantu dengan beberapa pertanyaan penelitian, yakni:

1. Bagaimana kondisi Kota Jakarta era 1960-an hingga menimbulkan kebijakan untuk melokalisasi prostitusi?
2. Mengapa daerah Kramat Tunggak yang dijadikan tempat lokalisasi?
3. Bagaimana Kramat Tunggak menjalankan fungsinya sebagai tempat lokalisasi, rehabilitasi dan resosialisasi?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait pendirian lokalisasi tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana eksistensi Lokalisasi Kramat Tunggak pada masa Gubernur Ali Sadikin. Kata eksistensi di sini berarti mencakup konsep lokalisasi dan tanggapan masyarakat terkait kebijakan Lokalisasi Kramat Tunggak oleh Gubernur Ali Sadikin. Selama ini, penulisan sejarah Jakarta tatkala dipimpin oleh

Ali Sadikin kurang membahas sisi Kramat Tunggak padahal prostitusi ada di sekitar kita, khususnya yang tinggal di kota-kota besar dan itu nyata.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penggunaan kata lokalisasi dalam tulisan ini merujuk pada lokalisasi prostitusi. Sehingga, untuk seterusnya dalam tulisan ini, kata yang digunakan adalah lokalisasi. Memang, dalam masyarakat kata lokalisasi sering diartikan sebagai tempat wanita tuna susila melakukan praktek prostitusi. Dengan kata lain, kata lokalisasi sudah mengacu pada tempat prostitusi. Namun, kata lokalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan.¹⁷ Berangkat dari definisi ini berarti kata lokalisasi hanya menunjukkan suatu tempat. Akan tetapi di masyarakat kata ini telah mengalami penyempitan makna.

Secara temporal, penelitian ini dimulai tahun 1971 dan diakhiri tahun 1977. Tahun 1971 dijadikan sebagai awal penelitian sebab Lokalisasi Kramat Tunggak didirikan secara resmi pada tahun tersebut. Mengakhiri penelitian pada 1977 disebabkan Gubernur Ali Sadikin, sebagai tokoh dibalik berdirinya Kramat Tunggak, telah selesai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kurun waktu ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan tentang lokalisasi di Kramat Tunggak, bagaimana ia menata lokalisasi tersebut, serta bagaimana respon orang-orang terhadap kebijakannya. Di sisi lain, untuk memperlihatkan kronologis yang jelas dan juga perubahan yang dialami Jakarta, penulisan ini juga akan menyajikan bagaimana kondisi Jakarta pada era 1960-an.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut *Encyclopaedia Britannica* (1973-1974), prostitusi dapat didefinisikan sebagai “praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian, prostitusi dikarakteristikan oleh tiga unsur utama, yaitu pembayaran,

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007. hlm. 680.

promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional”.¹⁸ Ketiga unsur tersebut membedakan prostitusi dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang kekasih atau suami istri.

Berbagai definisi lain mengindikasikan mengenai mendasarnya elemen pembayaran walaupun kriteria ekonomi semata tidaklah memadai. K. Davis berargumen dalam artikel *The Sociology of Prostitution* yang dimuat dalam *American Sociological Review* (1968) bahwa unsur promiskuitas harus ditonjolkan dalam definisi untuk membedakan prostitusi dari corak-corak hubungan seksual lain karena pembayaran dalam bentuk tertentu juga ditemukan dalam pranata sosial lain seperti pernikahan dan pertunangan.¹⁹

Dalam artikel *Prostitution* di *International Encyclopedia of Social Sciences* (1968), J. H. Gagnon memandang prostitusi sebagai “pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan, baik berupa barang maupun uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi lokal. Pembayaran diakui sebagai elemen prostitusi yang spesifik”. Dengan definisi ini, Gagnon mencoba untuk membedakan pelacur dengan wanita piaraan dan wanita yang memperoleh rangkaian pemberian pada saat melakukan kontak seksual secara rutin dengan pria.²⁰

Pendekatan lain diajukan oleh K. Barry melalui bukunya *Female Sexual Slavery* (1981b) yang menunjukkan bahwa wanita dipaksa untuk masuk ke dalam pelacuran oleh kaum pria yang menggunakan beragam sarana yang berkisar dari sekadar janji-janji untuk pekerjaan sampai ke penculikan fisik dan penyekapan.²¹ Dalam pendekatan ini, masuknya wanita ke dalam pelacuran tidak dipandang sebagai sebuah pilihan bebas namun sebagai hasil dari strategi khusus mucikari yang memperdagangkan wanita ke dalam pelacuran dengan memainkan kerentanan ekonomi.

¹⁸ Thanh-Dam Truong (terj), *Seks, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1992. hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

²¹ *Ibid.*, hlm. 17-18.

Selain pelbagai definisi di atas, dalam *Dictionary of Sociology* dikatakan bahwa objek dari prostitusi tidak hanya kaum wanita tetapi juga dilakukan oleh kaum pria. Dalam buku yang sama disebutkan pula bahwa fenomena prostitusi dimana kaum pria yang menjadi objek jarang terjadi.²² Namun, dewasa ini sudah banyak terjadi dimana kaum pria menjadi objek prostitusi.

Dengan demikian, prostitusi dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh individu bersama individu lainnya tanpa diskriminasi dengan tujuan imbalan, baik berupa uang atau yang lainnya. Kemudian, praktek prostitusi yang akan dibahas ke depan adalah praktek prostitusi yang dilakukan oleh kaum wanita.

1.6. Metode Penelitian

Tiap-tiap disiplin ilmu memiliki metode yang belum tentu sama dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang tahapan-tahapannya adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses heuristik, pengumpulan sumber, penulis melakukan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, penulis menemukan beberapa sumber penting terkait Kramat Tunggak, antara lain adalah Buku *Gita Jaya* yang merupakan catatan Gubernur Ali Sadikin tentang kondisi Jakarta kala ia menjadi Gubernur, Buku *Bang Ali Demi Jakarta, 1966-1977* yang merupakan memoar Ali Sadikin seputar jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang disunting oleh Ramadhan K. H. dan juga Buku *Menyusuri Remang-Remang Jakarta* karya Yuyu Krisna. Buku-buku tadi penulis temukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Sementara itu, penulis juga mendapat beberapa sumber untuk menggambarkan kondisi Jakarta pada era 1960-an, baik dari sisi pemerintah Kota Jakarta maupun dari penduduk Kota Jakarta. Sumber yang dimaksud adalah Buku *Karya Jaya* yang merupakan kenang-kenangan lima Kepala Daerah Jakarta dari tahun 1945 sampai 1966 serta buku *Gita Jaya* yang juga merupakan kenang-kenangan Gubernur Ali Sadikin sebagai Kepala Daerah Jakarta dari tahun 1966

²² *Dictionary of Sociology*. Philosophical Library: New York, 1944. Hlm. 238-239.

sampai 1977. Dari sudut pandang masyarakat tentang kondisi Kota Jakarta, penulis menemukan Buku *Jakarta 1950-an* dan juga Buku *Jakarta 1960-an*. Keduanya ditulis oleh Firman Lubis yang pada masa itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang berlokasi di daerah Salemba. Buku-buku karya Firman Lubis penulis dapatkan di toko buku terkemuka di Jakarta.

Untuk mendapatkan dokumen terkait pengelolaan Lokalisasi Kramat Tunggak, penulis menelusuri Arsip Provinsi DKI Jakarta (dikenal juga dengan nama Arsip Jayakarta) yang berada di Jalan Cikini Raya. Selain di Arsip Jayakarta, penulis juga mencari sumber tentang Kramat Tunggak di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang berada di Jalan Gunung Sahari. Dokumen-dokumen digunakan sebagai bukti otentik keberadaan Lokalisasi Kramat Tunggak yang sekarang ini sudah tidak ada.

Berhubung tema penelitian ini masih tergolong memungkinkan untuk melakukan wawancara terhadap masyarakat yang hidup dalam lintasan waktu penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah lisan untuk mendapatkan pandangan masyarakat terkait pendirian Lokalisasi Kramat Tunggak. Selain itu, penelusuran media cetak sezaman juga dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Tahap berikutnya penulis melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah yang telah didapat, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber sejarah tersebut dihadapkan agar menghasilkan fakta sejarah. Dengan demikian, sumber-sumber yang telah diperoleh dikritik secara internal maupun eksternal. Kemudian, fakta-fakta sejarah tersebut dimaknai dalam tahap interpretasi berdasarkan kelogisan berpikir.

Dalam tahap penulisan, historiografi, penulis menggunakan metodologi narativisme. Di sini penulis berupaya mendeskripsikan secara kronologis dan sistematis tentang kondisi dan perubahan-perubahan yang ada dalam batasan penelitian.

1.7. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat tiga buah buku yang dapat dijadikan rujukan utama sebagai pijakan penelitian. Ketiga buku tersebut adalah *Gita Jaya*, *Bang Ali Demi Jakarta: 1966-1977*, serta *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*. Buku-buku tersebut adalah sumber primer dalam penelitian ini.

Buku *Gita Jaya* yang merupakan catatan Ali Sadikin saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan demikian, buku ini memiliki subjektivitas yang cukup tinggi. Terlepas dari subjektivitasnya, buku ini memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi Kota Jakarta tatkala Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur. Selain itu, buku ini juga menguraikan kebijakan-kebijakan dan pencapaian-pencapaian Ali Sadikin selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, Buku *Bang Ali Demi Jakarta, 1966-1977* adalah memoar Ali Sadikin saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Adalah Ramadhan K. H. yang menyusun buku ini. Isinya merupakan tulisan para wartawan dan kolumnis koran maupun majalah yang ditulis saat Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Buku ini cukup menggambarkan sosok Ali Sadikin yang apa adanya dalam beberapa hal, salah satunya dalam mengambil suatu kebijakan. Walaupun subjektivitasnya cukup tinggi, buku memberikan hal-hal menarik di balik pengambilan kebijakan dan sosok Ali Sadikin.

Buku *Menyusuri Remang-Remang Jakarta* karya Yuyu Krisna yang diterbitkan tahun 1979 cukup komprehensif menggambarkan dunia prostitusi Kota Jakarta di tahun 1970-an. Ditambah lagi Yuyu Krisna melakukan observasi langsung ke tempat-tempat prostitusi di Kota Jakarta masa itu. Dengan begitu, data yang diperoleh untuk penulisan buku tersebut cukup akurat. Akan tetapi, buku ini tidak terlalu detail mendeskripsikan Kramat Tunggak karena ruang lingkupnya adalah dunia prostitusi di Jakarta secara keseluruhan.

1.8. Sistematika Penulisan

Penyajian tulisan ini oleh penulis dibagi ke dalam empat bab pembahasan. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Bab I ini menggambarkan apa yang akan ditulis dalam skripsi ini beserta dengan batasan dan teknis pembuatannya.

Bab II merupakan gambaran umum Jakarta tahun 1960-an serta mencoba untuk melihat sosok Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta. Adapun kondisi Jakarta yang diuraikan adalah segi pemerintahan, perekonomian, kependudukan, pelayanan public, serta dunia prostitusi. Pada masa ini lahir suatu konsep yang dijadikan landasan pemerintah daerah Jakarta dalam mengelola wilayahnya. Konsep tersebut ialah Rencana Induk yang berisi pola pembangunan Jakarta untuk 20 tahun.

Selanjutnya adalah Bab III yang membahas tentang eksistensi Kramat Tunggak selama periode Gubernur Ali Sadikin. Pembahasan tentang Kramat Tunggak tersebut meliputi ide tentang lokalisasi, pemilihan daerah Kramat Tunggak. Kemudian, bab ini menjelaskan juga fisik dan struktur yang ada di Kramat Tunggak. Tidak ketinggalan, keberadaan Kramat Tunggak sebagai lokalisasi, rehabilitasi, dan resosialisasi diuraikan pula. Sisi ini memang menjadi bagian penting dari pembahasan mengenai Kramat Tunggak. Sebagai tulisan sejarah, bab ini juga menjabarkan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan Kramat Tunggak. Salah satu bagian yang menarik dari keberadaan Kramat Tunggak juga dibahas, yakni tanggapan masyarakat terhadap Kramat Tunggak.

Bagian terakhir dari tulisan ini, Bab IV, menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Selain itu juga diberikan beberapa saran mengenai hal-hal yang belum terlalu terungkap dalam tulisan ini sehingga bisa dijadikan penelitian lebih lanjut.

BAB II

JAKARTA TAHUN 1960-AN DAN GUBERNUR ALI SADIKIN

2.1. Kondisi Umum Tahun 1960-an

2.1.1. Pemerintahan

Sebagai sebuah kota, Jakarta telah melewati beberapa perubahan status administrasi wilayah. Mulai dari sebuah kotapraja pada awal kemerdekaan sampai menjadi sebuah daerah tingkat I yang dinamakan Daerah Khusus Ibukota. Meskipun demikian, posisi Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan terus berlangsung.¹ Perubahan status tersebut merupakan bentuk kompromi pemerintah pusat untuk mencari titik keseimbangan bagi sebuah ibukota untuk menjalankan sebuah pemerintahan.

Sesuai UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pada 15 Januari 1960 Jakarta menjadi daerah tingkat I bernama Kotapraja Jakarta Raya yang kepala daerahnya disebut Gubernur. Mengingat perannya sebagai ibukota, kemudian dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1961.² UU ini menjadi penting karena aturan sebelumnya tentang pemerintahan daerah—UU No. 1 Tahun 1957—bersifat umum untuk semua daerah, sementara Jakarta sebagai ibukota perlu perlakuan lain demi kemudahan menjalankan pemerintahan. Berdasarkan UU tahun 1961 ini, Gubernur DKI Jakarta bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan anggaran belanjanya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

Dengan berlakunya UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1951 dicabut. Menurut UU ini, terdapat

¹ Pusat pemerintahan Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada saat revolusi karena Kota Jakarta yang telah dikuasai Belanda tidak memungkinkan untuk menjalankan sebuah pemerintahan.

² Wirosardjono. *op. cit.* hlm. 17.

tiga klasifikasi kota, yakni kota raya sebagai daerah tingkat I, kota madya sebagai daerah tingkat II, dan kota praja sebagai daerah tingkat III. Dalam kaitannya dengan Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia, diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU ini.³ Menurut Ali Sadikin, istilah kota raya dalam UU ini identik dengan kota metropolitan sehingga perlu penataan khusus. DKI Jakarta dianggap tidak memerlukan pembentukan daerah tingkat II dan III.

2.1.2. Perekonomian

Dari segi perekonomian, keadaan Jakarta pada 1960-an layaknya Indonesia pada umumnya. Nilai mata uang rupiah merosot tajam dalam waktu singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum pada 1962 masih sekitar Rp. 1 dan berubah menjadi Rp. 1.000 di tahun 1965. Kenaikan juga terjadi terhadap harga makanan. Harga semangkuk bakmi di Jalan Sabang seharga Rp. 5 di tahun 1962. Harganya melonjak menjadi Rp. 1.500 pada 1965.⁴ Harga-harga yang melambung tinggi dalam waktu singkat ini membuat pendapatan penduduk Jakarta seolah tidak berharga.

Kelangkaan kebutuhan pokok juga terjadi. Memiliki uang tidak menjamin akan mudah untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, dan gula pasir. Toko-toko yang menjual kebutuhan pokok ini pun terbatas dan jumlah pembeliannya dibatasi.⁵ Akibatnya, banyak masyarakat kelas bawah yang kekurangan bahan pangan. Pada awal kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, terdapat 20.000 gelandangan⁶ dan lebih dari 60% anak-anak usia sekolah tidak bersekolah.⁷

Anggaran yang tersedia di Pemerintah DKI Jakarta sendiri hanya Rp. 66.000.000 pada tahun 1966. Nominal tersebut sudah termasuk pendapatan daerah

³ *Ibid.*

⁴ Lubis. *op.cit.* *Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa*. Depok: Masup Jakarta, 2008. Hlm. 235-236.

⁵ *Ibid.* hlm. 236.

⁶ Husmiati. *op.cit* hlm. 36. Yang dikutip dari Biro V Bagian Perundang-undangan. Himpunan Lembaran-Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Pola Rehabilitasi Pembangunan Tiga Tahun DCI Jakarta* (1967-1969). Jakarta: Pemerintah DCI Jakarta, 1967. hlm 10.

⁷ Wirosardjono. *op. cit.* hlm. 169.

dan subsidi dari pemerintah pusat. Dengan anggaran tersebut, dianggap hanya cukup untuk pengeluaran rutin sehingga dana untuk pelayanan dan pembangunan tidak ada.⁸ Setelah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, muncul angka proyeksi untuk anggaran tahun yang sama sebesar Rp. 266.000.000.⁹ Akan tetapi, nominal tersebut juga dianggap belum cukup untuk penanganan fasilitas-fasilitas kota yang terabaikan.

2.1.3. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1961, penduduk Jakarta tercatat berjumlah 2.906.533 jiwa. Wilayah Jakarta Tengah (Pusat) menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dengan 1.002.059 jiwa sementara wilayah lain memiliki jumlah penduduk dengan kisaran yang sama, sekitar 570.000 jiwa.¹⁰ Kala itu Jakarta masih terbagi dalam tiga wilayah administrasi, yakni Jakarta Utara, Jakarta Tengah, dan Jakarta Selatan

Menurut perhitungan Lance Castle dalam *Buku Profil Etnik Jakarta*, penduduk Jakarta asli (Betawi) berjumlah 655.400 jiwa (22,9%) sementara sisanya adalah etnis lain yang didominasi oleh etnis Sunda (952.500 jiwa/32,8%) dan etnis Jawa (737.700 jiwa/25,4%). Sementara itu, etnis Tionghoa mencapai 294.000 (10,1%) atau menempati urutan empat terbanyak.¹¹ Dari data tersebut, nampak bahwa penduduk Kota Jakarta pada 1961 didominasi oleh para pendatang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jakarta sudah menjadi magnet bagi penduduk disekitarnya, baik dari sisi ekonomi ataupun yang lain.

Jumlah penduduk Jakarta terus meningkat hampir di tiap tahun. Menurut data Biro Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta di tahun 1969 berjumlah 4.273.863 jiwa.¹² Angka ini meningkat hampir dua kali lipat (31,99%) dibanding hasil sensus penduduk tahun 1961. Berikut adalah tabel

⁸ Ramadhan. *Op. cit.* hlm. 24-25.

⁹ *Ibid.* hlm. 46.

¹⁰ Sensus penduduk tahun 1971 yang dilansir BPS DKI Jakarta.

¹¹ Castle. *op. cit.* hlm. 60-61.

¹² Lihat <http://jakarta.bps.go.id/abstract/index.html>, diakses pada 12 Desember 2010 pukul 06.00 WIB.

jumlah penduduk Jakarta dari tahun 1960 sampai tahun 1969 yang dilansir Biro Pusat Statistik DKI Jakarta:

Tabel 1: Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta

Tahun	Jumlah Penduduk
1960	2.910.858
1961	2.906.533
1962	3.022.107
1963	3.154.405
1964	3.301.870
1965	3.462.945
1966	3.639.465
1967	3.806.866
1968	3.981.768
1969	4.273.863

Sumber: BPS DKI Jakarta

Peningkatan jumlah penduduk yang begitu cepat ini tentu akan menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah ke depan, mengingat sebelum Perang Dunia II Pemerintah Hindia Belanda membangun Jakarta untuk 600.000 penduduk.¹³ Sementara jumlah penduduk Jakarta hampir mencapai 3 juta jiwa di tahun 1961. Kondisi ini sedikit banyak menggambarkan bahwa Jakarta adalah kota yang kelebihan beban di tahun 1960-an karena belum ada perubahan yang berarti setelah proklamasi kemerdekaan.

Masalah yang mengiringi peningkatan jumlah penduduk di Jakarta adalah pemukiman. Pada tahun 1960-an, banyak muncul pemukiman baru di Jakarta. Mereka mendirikan pemukiman-pemukiman ini di sekitar pemukiman yang sudah ada, bantaran kali, sepanjang rel kereta api, bahkan di lahan kosong yang berada di tengah kota. Menurut Firman Lubis, yang melewati masa mudanya di Jakarta, banyak pemukiman baru bermunculan di sekitar wilayah tempat tinggalnya di Jalan Guntur. Pemukiman itu berada di daerah Menteng Wadas, Menteng Atas,

¹³ Wirosardjono. *op. cit.* hlm. 221.

dan Pedurenan. Banyak wilayah yang tadinya “hijau” telah berubah menjadi pemukiman. Di Jalan Sahardjo, dekat Jembatan Merah menuju pekuburan Menteng Pulo, masih berupa kebun di tahun 1950-an. Kemudian berubah menjadi pemukiman dan pasar pada 1960-an. Beberapa wilayah lain yang pemukimannya tumbuh dengan pesat pada 1960-an adalah Bendungan Hilir, Pejompongan, Karet Belakang, Karet Tengsin, Kebon Kacang, Setiabudi, Matraman, Utan Kayu, Pisangan Baru, Jatinegara Kaum, Rawamangun, Salemba, Gandaria, Cipete dan lain-lain.¹⁴ Di sini tampak bahwa semakin banyak pemukiman padat di Jakarta yang tidak beraturan.

Pemukiman-pemukiman tersebut dihuni oleh sekitar 3 juta penduduk Jakarta atau sekitar 60% penduduk Jakarta. Kondisi pemukiman tersebut tidak dapat dikatakan baik. Sanitasi yang buruk dan tidak adanya fasilitas untuk sarana kesehatan serta rumah-rumah tidak berventilasi dan kurang penerangan listrik adalah sebagian dari gambaran tentang pemukiman di Jakarta saat itu.¹⁵ Keadaan demikian menjadi ironi mengingat Jakarta adalah sebuah ibukota negara.

2.1.4. Pelayanan Publik

Sarana fisik Jakarta yang masih bermasalah adalah jalan raya. Pada umumnya, kondisi jalan di Jakarta pada 1960-an masih sempit dan banyak yang rusak karena rendahnya kualitas dan kurangnya pemeliharaan. Jalan-jalan tersebut diaspal secara manual, yakni dengan menyebarkan batu kerikil di atas jalan dan menyiramnya dengan aspal yang dimasak dalam drum dengan kayu bakar, kemudian disiram pasir di atasnya. Pada tahap akhir, digiling dengan mesin penggiling jalan (*stoomwals*).¹⁶ Pembuatan jalan dengan cara seperti ini membuat jalan kurang mulus, sering bergelombang, mudah terkelupas, dan berlubang ketika

¹⁴ Lihat Lubis. *op.cit.* hlm. 45-46.

¹⁵ Ramadhan. *op. cit.* hlm. 59. Lihat pula Husmiati. *op.cit.* hlm. 4. yang dikutip dari “Proyek Mohammad Husni Thamrin: Membangun Fasilitas Sebesar 3 Kota Medan” dalam *Progress*, Juni 1977.

¹⁶ Lubis. *op. cit.* hlm. 70.

musim hujan. Lain halnya dengan Jalan Raya By Pass yang pembuatan jalannya menggunakan teknik *hotmix*¹⁷ sehingga lebih mulus dari jalan lainnya.

Selain, masalah fisik jalan raya, panjang jalan yang tersedia di Jakarta dianggap sudah tidak mampu menanggung beban jumlah kendaraan yang ada. Panjang jalan yang ada kurang lebih sepanjang 800 km, sementara jumlah kendaraan yang ada pada 1966 sekitar 160.000 buah.¹⁸ Jumlah 200 kendaraan per kilometer jalan merupakan kepadatan yang tinggi. Dengan demikian, kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh oleh kendaraan adalah 20 km per jam saja. Akibatnya adalah sering terjadi kemacetan di jalan-jalan utama Jakarta. Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi roda perekonomian karena jalan raya adalah urat nadi perekonomian. Apabila kondisi jalan raya banyak yang rusak dan macet, kegiatan ekonomi pun akan terhambat.

Tidak hanya jalan raya yang bermasalah, moda transportasi yang ada juga kurang memadai. Sebelum tahun 1967, jumlah bus yang ada sejumlah 2.500 buah¹⁹ kendaraan untuk melayani penduduk Jakarta yang berjumlah sekitar 3.600.000 jiwa di tahun 1966. Saat itu, bus yang beroperasi adalah Bus PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta) dan delapan perusahaan bus swasta lain. Bisa dibayangkan kondisi bus-bus tersebut pada jam-jam sibuk, penuh dan sesak yang jauh dari kesan nyaman. Di awal masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta di tahun 1966, Ali Sadikin merasakan sendiri ketidaknyamanan tersebut. Ia merasakan berdesak-desakkan dalam bus kota di tengah bau apek dan bau keringat.²⁰ Di tahun 1960-an Trem listrik sudah dihapuskan dan belum ada taksi.

2.1.5. Dunia Prostitusi

Kehidupan malam seperti prostitusi ikut mewarnai kondisi Jakarta pada 1960-an. Tempat-tempat prostitusi tersebut tersebar di beberapa lokasi di Jakarta. Wilayah Jakarta Utara menjadi daerah yang paling banyak dijadikan sebagai tempat prostitusi. Menurut survei pemerintah daerah Jakarta pada 1969, terdapat

¹⁷ Teknik *hotmix* adalah teknik pelapisan menggunakan kendaraan khusus dengan memakai campuran kerikil dan aspal yang dipanaskan.

¹⁸ Ramadhan. *op. cit.* hlm. 96.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 132.

²⁰ *Ibid.*

1.668 orang pekerja seks komersil di Jakarta Utara.²¹ Jumlah tersebut tersebar di 13 lokasi dalam 9 kelurahan di Jakarta Utara. Kesembilan kelurahan tersebut ialah Cilincing, Kalibaru, Koja Utara, Pejagalan, Pademangan, Penjaringan, Tugu, Semper, serta Legoa. Jumlah pekerja seks komersil di Jakarta tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Beberapa titik prostitusi yang populer pada masa itu di Jakarta Utara antara lain Kalibaru, Koja Lama, dan Pela-Pela²² yang berada sepanjang rel dekat Stasiun Kereta Api Tanjung Priok.

Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Senen atau lebih terkenal dengan sebutan Planet Senen juga merupakan salah satu tempat prostitusi yang populer di masyarakat. Para pekerja seks komersil di sana mendirikan bangunan-bangunan liar yang biasanya terbuat dari kardus di sekitar jalur kereta api. Bangunan-bangunan tersebut dijadikan tempat transaksi seksual mereka selain di gerbong-gerbong yang tengah diparkir.²³ Perjalanan kereta api pun terhambat dibuatnya. Dari gambaran tersebut, jelas terlihat bahwa ini merupakan tempat prostitusi bagi kalangan menengah ke bawah.

Selain di sekitar stasiun, praktik prostitusi di wilayah Senen melebar hingga pinggir jalan raya antara Senen dan Salemba. Terlebih, praktek prostitusi di sini diwarnai oleh fenomena “becak komplit”²⁴. Dinamakan “becak komplit” karena sang pekerja seks komersil bekerja sama dengan pengemudi becak. Pengemudi becak membawa keliling sang pekerja seks komersil untuk mencari pelanggannya. Situasi ini cukup menggambarkan akses untuk menggunakan jasa wanita tuna susila sungguh mudah bagi siapa pun termasuk anak di bawah umur. Dan jangan lupa pula bahwa jalan raya antara Senen hingga Salemba adalah jalan utama di ibukota, jalan yang sering dilalui oleh masyarakat Jakarta

²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Jakarta Utara dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. *Survei dan penelitian dampak Sosial Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak Terhadap Lingkungan Sekitarnya*. Jakarta, 1987. hlm. 13.

²² Wawancara dengan H. Masin.

²³ Ramadhan. *op. cit.* hlm. 197.

²⁴ *Ibid.*

Tidak jauh dari daerah Senen, titik prostitusi juga ada, yakni di daerah yang sekarang bernama Gg. Sadar.²⁵ Tempat ini memang telah ada sejak zaman kolonial. Kala itu nama tempat ini dikenal dengan sebutan *Noordwijk*. Para pekerja seks di sini tidak hanya berasal dari kalangan pribumi namun juga perempuan China.²⁶ Daerah ini memang dikenal sebagai Pecinan di Jakarta sampai sekarang.

Di wilayah Tanah Abang, terdapat tempat prostitusi yang disebut Bongkaran. Menurut warga setempat, nama Bongkaran disematkan karena pada siang hari di tempat tersebut dijadikan sebagai tempat membongkar bahan galian seperti pasir dari Tangerang yang diangkut dengan kereta api. Bahan galian yang tiba kemudian diangkut dengan truk-truk untuk didistribusikan di Jakarta.²⁷ Dengan demikian, bisa dilihat bahwa konsumen dari Bongkaran kebanyakan adalah para pekerja di sekitar tempat bongkar muat pasir di sana. Bongkaran memang merupakan kawasan yang letaknya cukup strategis untuk pertumbuhan praktek prostitusi, karena berada pada bantaran kali Krukut dengan deretan gubuk-gubuk liarnya, bersebelahan dengan pasar Tanah Abang yang selalu ramai, serta dekat juga dengan stasiun kereta api Tanah Abang.

Ada kesamaan antara Pela-Pela di Tanjung Priok, Planet Senen, dan Bongkaran di Tanah Abang. Lokasi ketiganya dekat dengan jalur kereta api. Menurut Terence Hull, kesamaan ini bisa ditinjau dari situasi masa kolonial.²⁸ Pada akhir abad ke-19, perluasan perkebunan dibarengi dengan pembangunan jalur kereta api sebagai penopang mobilitas hasil perkebunan. Pembangunan jalur kereta api ini menstimulasi migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian besar dari pekerja tersebut adalah jejak yang berpotensi menciptakan permintaan terhadap aktivitas prostitusi.

²⁵ Wawancara dengan K.H. Harun Al-Rasyid.

²⁶ John Ingleson, "Prostitution in Colonial Java", dalam D. Chaudler dan M.C. Ricklefs. *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia*. Melbourne: Monash University Press, 1986. Hlm. 127

²⁷ Lamijo, "Prostitusi di Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan, 1930-1959: Sejarah dan Perkembangannya", <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=22>, 8 April 2009. Yang diakses pada 1 Juni 2011.

²⁸ Terence, Op. Cit. hlm. 7.

Menuju ke Selatan di wilayah Cijantung terdapat tempat prostitusi yang bernama Boker. Boker berada tidak jauh dari Jalan Raya Bogor. Hanya saja tempatnya terhalang oleh toko-toko yang ada di tepi jalan sehingga tidak begitu terlihat dari jalan raya. Tempat ini malah membaur dengan pemukiman penduduk. Rumah-rumah bordil di sini juga dihiasi dengan bar sebagai hiburan para tamu. Setidaknya Boker telah ada sejak 1950-an.²⁹ Tamu yang datang juga ada orang asing. Ini menunjukkan bahwa Boker telah dikenal luas oleh masyarakat.

Selain tempat prostitusi yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa tempat prostitusi lain di Jakarta yang telah ada di tahun 1960-an. Tempat-tempat tersebut antara lain Bina Ria Ancol,³⁰ Kali Jodo,³¹ serta Rawa Bangke³². Layaknya tempat-tempat yang telah dibahas sebelumnya, tempat-tempat ini juga kebanyakan dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah.

2.2. Rencana Induk Jakarta

Untuk mengelola sebuah kota perlu perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik bisa dilakukan dengan membuat program jangka panjang, terlebih bila kota tersebut adalah sebuah ibukota negara. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi tentu memiliki pertumbuhan yang dinamis. Apabila perencanaannya tidak berorientasi jauh ke depan, mungkin situasi Jakarta bisa menjadi semrawut.

2.2.1. Rencana Pendahuluan

Rencana pembangunan Jakarta, yang dinamakan Rencana Induk, mulai diterapkan pada masa Gubernur Ali Sadikin. Rencana Induk ini menjadi landasan setiap kebijakan Pemerintah DKI Jakarta setidaknya pada masa Gubernur Ali Sadikin. Dalam Rencana Induk ini termaktub pola pembangunan Jakarta untuk 20 tahun (1965-1985). Dari proyeksi kurun waktunya jelas terlihat bahwa Rencana Induk ini bukan produk masa pemerintahan Ali Sadikin—Ali Sadikin baru

²⁹ Krisna, *op. cit.* hlm. 93-94.

³⁰ Krisna, *op. cit.* hlm. 82.

³¹ Wawancara dengan H. Masin. (usia 59 thn) mantan pengasuh Kramat Tunggak pada 15 Mei 2011 di Jakarta.

³² Lubis. *op.cit.* hlm. 75-76.

menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 1966. Rencana Induk³³ ini dibuat saat Jakarta dipimpin oleh Soediro, tepatnya selesai dibuat pada 1957.

Berdasarkan UU Pembentukan Kota No. 168 Tahun 1948, Pemerintah Daerah Jakarta menganggap perlu untuk membuat suatu Rencana Induk untuk perkembangan Jakarta. Rencana Induk mengatur tempat-tempat mana saja yang akan dijadikan perumahan, perkantoran, tempat hiburan serta yang lainnya.³⁴ Pada intinya, Rencana Induk mengatur penggunaan lahan yang ada di Jakarta agar tercipta tata kota yang teratur sehingga melahirkan kenyamanan bagi mereka yang beraktivitas di Jakarta.

Dalam membuat Rencana Induk, Pemerintah Daerah Jakarta mendapat bantuan dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang mengutus Prof. Clifford Holliday pada 1954 guna merintis pelaksanaan tersebut. Ide untuk membuat suatu Rencana Induk berasal Holliday yang dilakukan menurut pendekatan ilmu tata kota.³⁵ Ilmu tata kota sendiri dipelopori oleh Prof. Sir Patrick Geddes pada akhir abad ke-19. Sebelum ilmu tersebut berkembang, para arsitek membuat rencana pembangunan kota tanpa memerhitungkan situasi apa yang mungkin dihadapi kota tersebut di masa yang akan datang.

Prof. Clifford Holliday hanya membantu proyek ini selama enam bulan. Dalam kurun waktu tersebut, ia melakukan survei terhadap kehidupan masyarakat mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan dan kesulitan masyarakat Jakarta dari pelbagai kalangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik saat itu maupun kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang.³⁶ Layaknya ilmu-ilmu sosial-sosial yang berkembang saat ini, untuk mendapatkan data yang akurat, mendalam, dan komprehensif memang dibutuhkan observasi langsung ke lapangan. Apalagi perencanaan ini juga untuk beberapa tahun ke depan.

³³ Sebelum diterapkan oleh Gubernur Ali Sadikin, Rencana Induk (*Master Plan*) ini baru sekedar konsep hasil penelitian dan belum memiliki kekuatan hukum.

³⁴ Soedarmadji (ed). *Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta: 1945-1966*. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. hlm. 115.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Untuk melanjutkan penelitian untuk membuat Rencana Induk yang dirintis oleh Prof. Clifford Holliday, Direktur DPU (Dinas Pekerjaan Umum), Ir. S. Danunegoro dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa Barat untuk mempelajari perkembangan Ilmu Tata Kota yang baru selama enam bulan.³⁷ Hal ini dilakukan karena Ilmu Tata Kota dengan pendekatan Rencana Induk merupakan sesuatu yang baru bagi insinyur-insinyur di Indonesia. Amerika Serikat dan Eropa Barat dipilih karena memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik dari Indonesia, bahkan mungkin hingga saat ini.

Pada 1956 PBB kembali mengirim utusannya untuk membantu membuat Rencana Induk bagi Kota Jakarta. Kali ini PBB mengutus K.A. Watts. Agar bekerja lebih optimal, DPU membentuk bagian Rencana Induk secara khusus yang bekerja langsung di bawah tenaga ahli yang diutus PBB tersebut. Untuk membantu kerja K.A. Watts, kemudian dikirim lagi beberapa tenaga ahli lainnya. Mereka adalah Petit (seorang ahli dalam bidang pembiayaan pembangunan kota), Franklin (seorang ahli dalam bidang arsitektur). Tidak ketinggalan pula menambah unsur dari orang-orang Indonesia. Akan tetapi mereka dikirim terlebih dulu ke luar negeri sebelum bergabung dengan tim pembuat Rencana Induk untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mereka. Mereka semua adalah pegawai DPU, beberapa di antara mereka yakni Ir. Obrien, Z. Kapitan, Darundono B.A., Ir. Soewarto, Ir. Anas Madjit.³⁸ Menambahkan orang-orang Indonesia dalam proyek ini dimaksudkan agar putra Indonesia juga berperan aktif dalam melakukan pembangunan negerinya serta menambah wawasan dan pengalaman mereka.

Aktivitas yang dilakukan K.A. Watts dalam rangka membuat Rencana Induk adalah melanjutkan survei terhadap masalah penduduk, kesempatan kerja, perumahan, dan lalu lintas. Melalui survei tadi, dipelajari pula sejarah perkembangan Kota Jakarta, masalah tata guna tanah, dan bangunan seperti bangunan pusat pemerintahan, sekolah, tempat ibadah, gedung sejarah dan sebagainya.³⁹ Apa yang dilakukan oleh Watts beserta timnya merupakan penelitian lanjutan dari yang dilakukan Holliday. Tujuannya adalah melengkapi

³⁷ *Ibid.* hlm. 117.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

dan menambahkan data-data apa saja yang belum lengkap maupun yang belum ada. Berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan oleh kedua orang utusan PBB tersebut, kemudian dibuat Rencana Pendahuluan (*Outline Plan*) Jakarta Raya pada 1957.

Dalam Rencana Pendahuluan antara lain dinyatakan bahwa Jakarta adalah suatu kota yang cepat berkembang menjadi kota metropolis, pertumbuhan kota dalam waktu singkat meluap melampaui batas-batas kota semula. Oleh karena itu, persiapan Rencana Induk Jakarta Raya tidak dapat diselesaikan tanpa memperhitungkan interaksi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dengan pendekatan regional ini, penyusunan Rencana Pendahuluan ini telah mempertimbangkan perkembangan Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang kemudian dikenal sebagai rencana pembangunan regional JABOTABEK.⁴⁰ Tidak hanya bersifat regional, Rencana Induk Jakarta dianggap perlu dikaitkan dengan pembangunan nasional, yang konsepnya sedang disusun oleh BPN (Biro Perancang Negara) yang kala itu dipimpin oleh Ir. H. Djuanda.⁴¹ Rencana pembangunan wilayah suatu negara memang perlu terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional agar bisa tercipta kemudahan-kemudahan dalam segala bidang, terlebih Jakarta adalah sebuah ibukota negara.

Adapun poin-poin penting dari Rencana Pendahuluan Jakarta mencakup hal sebagai berikut:⁴²

1. Segala asumsi didasari bahwa Jakarta tetap menjadi ibukota negara.⁴³
2. Pertambahan penduduk diperkirakan sebesar 4% per tahun atau sekitar 80.000 jiwa. Kemudian dijadikan acuan untuk memerkirakan kebutuhan kesempatan kerja, perumahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, industri, dan perkantoran

⁴⁰ Sebutan JABOTABEK sekarang telah mengalami sedikit perubahan menjadi JABODETABEK mengingat wilayah Depok telah memisahkan diri dari Bogor dan membentuk kota tersendiri.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 119.

⁴² *Ibid.* hlm. 119-121.

⁴³ Jakarta resmi menjadi ibukota negara melalui UU No. 10 tahun 1964.

3. Diupayakan untuk membentuk suatu lembaga pemerintahan yang memegang peranan sebagai *Single Landroad*, sesuai dengan konsepsi Sir William Holford.
4. Wilayah Medan Merdeka dan Lapangan Banteng dicanangkan menjadi kompleks pemerintahan.
5. Wilayah di antara Pasar Ikan dan Tanjung Priok direncanakan menjadi tempat rekreasi.
6. Pemandangan Kebun Binatang dari Cikini.
7. Pembangunan Museum Nasional.
8. Pembentukan *Regional Planning Board or Commission* sebagai lembaga yang mampu menyatukan dukungan masyarakat dalam membangun Kota Jakarta.
9. Pembangunan sarana air bersih.
10. Pembangunan kota satelit di Kebayoran Baru.

Dari beberapa poin yang diungkapkan di atas terlihat ada upaya jauh ke depan dari pemerintah daerah untuk menata Jakarta, mulai dari perumahan, perkantoran, hiburan, daerah pendukung, dan yang lainnya. Hanya saja, konsep ini sulit berjalan bila tidak ada dana yang memadai. Dalam Rencana Pendahuluan ini masalah dana masih menjadi pembahasan: bagaimana memperoleh dana untuk menjalankan konsep tersebut.

2.2.2. Rencana Induk

Rencana Pendahuluan ini kemudian dijadikan dasar pembentukan Rencana Induk Jakarta yang disahkan DPRD pada 1959. Untuk menyempurnakan Rencana Induk ini, Pemda DKI Jakarta melalui DPU terus melakukan kajian mendalam. Salah satunya adalah mengutus Ir. Piek Mulyadi dan Ir. Tjong untuk menghadiri Seminar *Metropolitan Planning in Asia* di Jepang pada 1964. Setelah selesai dibahas di tingkat daerah, Rencana Induk ini dibawa kepada pemerintah pusat untuk disahkan.⁴⁴ Kala itu Kota Jakarta dipimpin oleh Soemarno. Perlunya membawa Rencana Induk Kota Jakarta kepada pemerintah pusat karena Jakarta

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 207 dan 211.

merupakan kewenangan pemerintah pusat juga—karena statusnya sebagai ibukota negara—selain pemerintah daerah.

Pada masa Gubernur Ali Sadikin, Rencana Induk, yang telah dibuat melalui proses yang panjang, dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Olehnya, Rencana Induk ini dibawa ke DPR-GR untuk dibahas. Melalui Surat Keputusan DPR-GR tanggal 3 Mei 1967, Rencana Induk Jakarta (1965-1985) resmi menjadi landasan dalam membangun Jakarta.⁴⁵ Rencana Induk Jakarta memang telah beberapa kali disahkan oleh lembaga terkait. Akan tetapi, baru menjadi tindakan nyata pada masa Gubernur Ali Sadikin selain karena terus mengalami penyempurnaan.

Ali Sadikin dikenal sebagai gubernur yang tegas dan keras dalam bersikap. Latar belakang Ali Sadikin yang berasal dari kalangan militer sedikit banyak berpengaruh terhadap sikapnya tersebut. Dalam kaitannya dengan memimpin Jakarta, ia memandang perlunya suatu terobosan untuk menata Jakarta mengingat masalah Jakarta begitu kompleks saat ia baru menjabat sebagai gubernur. Setelah memetakan situasi, perhatiannya tertuju pada Rencana Induk yang telah disusun oleh pendahulunya. Rencana Induk dianggapnya penting sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Jakarta saat itu dan juga ke depannya mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk Jakarta. Banyak penduduk berarti butuh pelayanan lebih.

Terkait dengan masalah hiburan malam, Rencana Induk tidak membahasnya, apalagi melokalisasi prostitusi.⁴⁶ Memang tidak mungkin ada lahan yang khusus diperuntukkan untuk prostitusi pada masa itu karena kekuatan politik Islam masih mapan saat itu. Hal ini menunjukkan pembentukan lokalisasi prostitusi di Kramat Tunggak adalah murni kebijakan Gubernur Ali Sadikin.

2.2.3. Anggaran Rencana Induk

Penerapan Rencana Induk membutuhkan dana yang besar. Untuk itu Ali Sadikin melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan

⁴⁵ Ramadhan. *op. cit.* hlm. 109-110.

⁴⁶ Lihat peta peruntukkan wilayah Jakarta di lampiran.

daerah. Pajak, yang merupakan pendapatan terbesar pemerintah, terus digalakkan dan dicari. Ali Sadikin berpendapat bahwa pelayanan memerlukan dana sehingga tidak bayar pajak berarti tidak ada pelayanan.⁴⁷ Ungkapan itu yang sering diutarakannya dalam berbagai kesempatan. Ali Sadikin mengerti benar arti penting pajak bagi berlangsungnya pembangunan karena sebenarnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali dalam bentuk lain, yakni pelayanan.

Dari tahun ke tahun sejak dipimpin oleh Ali Sadikin, penerimaan pajak DKI Jakarta terus mengalami kenaikan. Hal ini salah satunya tercermin dari anggaran belanja pemerintah DKI Jakarta yang terus meningkat, dari Rp. 66.000.000 di tahun 1966/1967 menjadi Rp. 89.516.580.000 pada 1977/1978. Beberapa pungutan pajak yang diintensifkan antara lain adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Daerah (SWP3D), Pajak Pembangunan I, Pajak Tontonan, Pajak atas Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak Reklame, dan Pajak Bangsa Asing.⁴⁸ Sistem administrasi penarikan pajak-pajak tersebut diperbaiki agar tidak terjadi praktek pengemplangan pajak.

Pencarian sumber-sumber pemasukan baru juga mendapat perhatian serius. Salah satu sumber pemasukkan baru bagi pemerintah DKI Jakarta adalah pajak judi dengan melegalkan praktek perjudian di Jakarta. Berdasarkan UU No. 11 tahun 1957, yang memungkinkan pemerintah daerah memungut pajak atas izin perjudian, Ali Sadikin melegalkan praktek perjudian di Jakarta. Hanya saja, penerima izin dan pemainnya harus orang-orang Tionghoa karena berjudi dianggap sebagai bagian dari kebudayaan mereka.⁴⁹

Pada 1960-an terdapat banyak tempat perjudian di Jakarta. Jenis yang dimainkan antara lain dadu koprok, piringan berputar, mahyong dan lain sebagainya. Tempat-tempat perjudian tersebut tidak membayar pajak sehingga tidak menghasilkan pemasukan bagi pemerintah daerah dan biasanya dilindungi

⁴⁷ Ali Sadikin mengungkapkannya dalam istilah asing, yakni *no money no service* dan *no tax no serviced*. *Ibid.* hlm. 49 dan 111.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 111-112.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 61-62

oleh oknum-oknum tertentu.⁵⁰ Di sisi lain, Jakarta sangat memerlukan anggaran yang besar untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan. Ali Sadikin pada masa pemerintahannya melakukan terobosan dengan melarang praktek perjudian gelap melalui surat keputusan No. Bd/9/1/5/1967 dan kemudian melegalkan praktek perjudian di Jakarta di bawah pengawasan pemerintah daerah.

Sebenarnya telah ada wacana dari para pendahulu Ali Sadikin—Sudiro dan Sumarno—untuk menarik pajak dari praktek perjudian namun tidak terlaksana meski telah ada landasan hukumnya yang tertuang dalam UU No. 11 tahun 1957 yang memungkinkan pemerintah daerah memungut pajak dari praktek perjudian. Disinyalir, tentangan dari partai politik Islam pada masa itu membuat legalisasi perjudian menjadi suatu hal yang sulit terlaksana.

Dengan dibukanya izin perjudian, kemudian tempat perjudian resmi di Jakarta ditetapkan di beberapa tempat seperti Casino Petak IX, Casino Jakarta Theater, Casino Copa Cabana, Stand Ketangkasan di Jakarta Fair, Lotto-fair Proyek Senen dan Krekot, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, Toto Hailai Ancol, dan Toto Greejhound di Senayan.⁵¹

Berikut penerimaan Pemda DKI dari perjudian:⁵²

Tabel 2: Penerimaan Pajak Judi

Jenis Judi	1968	1969/1970	1970/1971	1971/1972	1972-1973
Hwa Hwe	689.499	-	-	-	-
Casino	-	1.408.000	1.162.710	1.881.844	3.528.673
Lotto	260.688	722.754	584.463	463.249	434.644

Nominal penerimaan dalam ribuan rupiah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penerimaan daerah dari pajak judi sangat mengalami kenaikan tiap tahunnya di beberapa jenis judi. Angka-angka ini pastinya sangat berguna untuk pembangunan Jakarta. Selain dari sumber lain,

⁵⁰ Oknum-oknum tersebut dikatakan oleh Ali Sadikin biasanya adalah dari kalangan militer. Lihat Ramadhan. *op. cit.* hlm. 63.

⁵¹ Wirosardjono. *op. cit.* hlm. 130.

⁵² Husmiati. *op. cit.* hlm. 76-77. Yang dikutip dari Direktorat VI, Keuangan DKI Jakarta. *Rencana Pembangunan Lima Tahun II, 1974-1978.* hlm. 131.

pajak judi tersebut nantinya untuk pembangunan jalan raya, sekolah, puskesmas, pasar, dan yang lainnya yang merupakan bagian dari Rencana Induk. Memang, kebijakan ini mendapat tantangan keras khususnya dari kalangan umat Islam. Namun, Ali Sadikin maju terus dengan argumen bahwa yang diberi izin berjudi adalah orang-orang Tionghoa dan mereka pula yang boleh berjudi.

2.3. Gubernur Ali Sadikin

Ali Sadikin adalah Gubernur pilihan Presiden Soekarno yang dilantik pada 28 April 1966 di Istana Negara. Kala itu memang jabatan gubernur diangkat langsung oleh presiden. Presiden Soekarno punya beberapa alasan memilih Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta. Latar belakang Ali Sadikin yang berasal dari Angkatan Laut dianggap mampu memimpin Jakarta yang merupakan kota pelabuhan.⁵³ Menurut Susan Abeyasekere, pengangkatan Ali Sadikin oleh Soekarno lebih kepada faktor politis. Soekarno menganggap Angkatan Laut masih loyal padanya setelah peristiwa G 30 S/PKI.⁵⁴ Alasan lainnya adalah karena watak Ali Sadikin yang keras kepala dianggap sebagai figur yang tepat bagi Soekarno untuk memimpin Jakarta.⁵⁵ Tentu saja kombinasi keras kepala dan loyal kepadanya menjadi figur yang ideal sehingga tidak mudah digoyang oleh kelompok lain.

Ada beberapa kebijakan Gubernur Ali Sadikin yang cukup populer, dalam pengertian masih diingat sampai puluhan tahun setelahnya. Satu di antara kebijakannya tersebut adalah perluasan wilayah DKI Jakarta dengan cara—pastinya—mengambil alih beberapa bagian wilayah dari propinsi Jawa Barat. Pemekaran wilayah ini sesuai yang diamanatkan Rencana Induk DKI Jakarta yang juga ditafsirkan Ali Sadikin.

Terkait pemekaran wilayah DKI Jakarta yang mengambil alih beberapa bagian wilayah Jawa Barat, Ali Sadikin mendapat tentangan keras dari Gubernur Jawa Barat. Pemekaran yang ditawarkan Ali Sadikin adalah mencakup wilayah Cibinong, Depok, dan Bekasi. Bahkan, pemerintah pusat mengusulkan diperluas

⁵³ *Ibid.* hlm. 19.

⁵⁴ Susan Abeyasekere, *Jakarta a History*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 215.

⁵⁵ *Ali Sadikin: Mengusur dan Membangun*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1977. hlm. 10.

sampai Ciawi, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Namun, usul Ali Sadikin ini ditentang oleh Gubernur Jawa Barat, Solihin. Sesama orang Sunda ini mulai mendiskusikan masalah ini. Solihin sempat mengusulkan untuk menyatukan wilayah DKI Jakarta dengan Jawa Barat dengan Ali Sadikin sebagai gubernurnya. Ide ini ditolak karena bukan itu yang diinginkan oleh Jakarta. Setelah melakukan pelbagai pembahasan, disepakati bahwa perluasan wilayah DKI Jakarta hanya meluruskan wilayah-wilayah perbatasan.⁵⁶ Dengan perluasan ini Pemda DKI lebih leluasa dalam melakukan pembangunan karena sebelumnya Jakarta dianggap kelebihan beban.

Kebijakan lain Ali Sadikin yang cukup populer adalah program perbaikan kampung. Program perbaikan kampung dicetuskan oleh Ali Sadikin untuk menata keadaan kampung-kampung di Jakarta yang padat dan kurang terawat karena arus urbanisasi. Upaya ini sering dikenal sebagai Proyek Muhammad Husni Thamrin. Nama Husni Thamrin digunakan untuk mengenang tokoh asal Jakarta tersebut. Jumlah penduduk yang tinggal di kampung-kampung sekitar 60% dari penduduk Jakarta menjadi alasan kuat untuk melakukan proyek ini.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 359-362.

BAB III

LOKALISASI KRAMAT TUNGGAK

3.1. Latar Belakang Lokalisasi

3.1.1. Ide dan Realisasi

Konsekuensi logis dari masalah perekonomian dan kependudukan Jakarta pada 1960-an, fenomena prostitusi semakin kuat untuk menunjukkan eksistensinya. Motif ekonomi memang menjadi alasan utama tumbuh suburnya praktek prostitusi. Saat itu, tempat prostitusi di Jakarta muncul antara lain Pela-Pela, Koja Lama, Kalibaru, Kali Jodo, Bongkaran, Planet Senen, Rawa Bangke, dan Boker.¹ Tempat-tempat tersebut pun dekat dengan pusat ekonomi. Misalnya adalah Pela-Pela, Koja Lama, dan Kalibaru yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, Bongkaran dan Planet Senen juga dekat dengan stasiun kereta dan pasar. Dekat dengan pusat ekonomi berarti dekat dengan orang yang memiliki uang. Di sini pekerja seks komersil mencari celah untuk menjalankan aksinya. Di sisi lain, ini bisa diartikan sebagai pemenuhan permintaan lelaki hidung belang.

Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Senen atau lebih terkenal dengan sebutan Planet Senen merupakan salah satu tempat prostitusi yang populer di masyarakat. Para pekerja seks komersil di sana mendirikan bangunan-bangunan liar yang biasanya terbuat dari kardus di sekitar jalur kereta api.² Selain di sekitar stasiun, praktik prostitusi di wilayah Senen melebar hingga pinggir jalan raya antara Senen dan Salemba. Terlebih, praktek prostitusi di sini diwarnai oleh fenomena “becak komplit”³. Dinamakan “becak komplit” karena sang pekerja seks komersil bekerja sama dengan pengemudi becak. Pengemudi becak membawa keliling sang pekerja seks komersil untuk mencari pelanggannya.

¹ Lamijo, “*Prostitusi Di Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan, 1930 – 1959: Sejarah dan Perkembangannya*”. Artikel yang dimuat pada 8 April 2009 dalam situs resmi Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada: diakses pada 30 Juni 2011. Periksa pula Lubis, *op. cit* hlm. 75-76.

² Ramadhan. *op. cit.* hlm. 197.

³ *Ibid.*

Situasi seperti di atas cukup menggambarkan akses untuk menggunakan jasa wanita tuna susila sungguh mudah bagi siapa pun termasuk anak di bawah umur. Dan jangan lupa pula bahwa jalan raya antara Senen hingga Salemba adalah jalan utama di ibukota, jalan yang sering dilalui oleh masyarakat Jakarta. Keberadaan para pekerja seks komersil bersama becak komplitnya akan membuat kotor wajah ibukota.

Ali Sadikin sebagai pimpinan pemerintah daerah memandang perlu membenahi kehidupan malam di Jakarta khususnya kondisi seperti di sekitar kawasan Senen. Sebagian pihak memandang bahwa langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menampung para pekerja seks komersil dan kemudian menyalurkan mereka ke beberapa proyek. Langkah ini dianggap sulit terlaksana mengingat beban Jakarta kala itu. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Gubernur Ali Sadikin memutuskan untuk melokalisasi praktek prostitusi di Jakarta pada satu tempat.⁴

Ide untuk melokalisasi praktek prostitusi tidak datang begitu saja. Di awal masa jabatannya, Ali Sadikin melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota di luar negeri seperti Singapura, Manila, dan Bangkok.⁵ Ali Sadikin ingin melihat langsung pengelolaan kota Negara tetangga sebagai perbandingan dengan situasi di Jakarta. Kunjungan Ali Sadikin ke Bangkok mengilhaminya untuk melokalisasi praktek prostitusi di Jakarta. Pada awal kedatangannya, ia heran karena tidak melihat satu pun pekerja seks komersil di sudut kota. Padahal, Bangkok sudah terkenal akan industri seksnya. Setelah berkonsultasi dengan orang KBRI di Bangkok, ia mendapat informasi bahwa praktek prostitusi di Bangkok telah dilokalisasi oleh pemerintah.⁶ Di sini Ali Sadikin melihat bahwa konsep lokalisasi menjadi salah satu pilihan yang paling masuk akal untuk diterapkan di Jakarta. Apalagi di Surabaya praktek prostitusi juga telah dilokalisasi.⁷ Mengapa Jakarta tidak melakukan hal serupa?

⁴ *Ibid.*

⁵ Ramadhan K. H. *Pers Menjawab Bang Ali Menjawab*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995. hlm. 24.

⁶ Ramadhan. *op.cit.* hlm. 199-200

⁷ *Ibid.*

Untuk merealisasikan hasil kunjungan kerja dari Bangkok tersebut, mulai tahun 1969 pemerintah daerah DKI Jakarta gencar melakukan sosialisasi terhadap para mucikari yang beroperasi di Jakarta.⁸ Mereka diharuskan untuk memindahkan tempat prakteknya ke tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai landasan hukumnya, pada April 1970 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70 tentang pelaksanaan lokalisasi dan resosialisasi para pekerja seks komersil.

Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70 sama sekali tidak menyebutkan Kramat Tunggak sebagai tempat yang akan dijadikan lokalisasi. SK tersebut hanya menjelaskan pembagian tugas pelaksanaan pendirian lokalisasi serta instansi yang akan terlibat di dalamnya secara garis besar. Meskipun demikian, wilayah Kramat Tunggak sudah diproyeksikan menjadi lokalisasi yang dimaksud. Adapun landasan hukum pemilihan Kramat Tunggak sebagai lokalisasi prostitusi tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 25/III/DU/1970.⁹ Sementara itu, Lokalisasi Kramat Tunggak resmi dibuka pada 1971. Pada pelaksanaannya, tahun 1969 pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pelaku praktek prostitusi di Jakarta. Tahun 1970 para pelaku prostitusi tersebut mulai pindah ke Kramat Tunggak. Tahun 1971 pembangunan Kramat Tunggak lebih intensif dan kemudian diresmikan pada tahun yang sama.

Menurut Ali Sadikin, langkahnya melokalisasi praktek prostitusi agar wajah Jakarta tidak terlihat jorok dan kotor. Ia ingin menghapus pemandangan yang dianggapnya kurang sedap dipandang karena para pekerja seks komersil ini biasa menjajakan diri di pinggir jalan. Melokalisasi berarti mempersempit ruang gerak praktek ini sehingga para pelakunya bisa dibina.¹⁰ Telaumbanua, sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara yang menjabat pada 1978, menambahkan bahwa mereka yang dilokalisasi berangsur-angsur dibina sedemikian rupa agar mereka siap kembali ke masyarakat.¹¹

⁸ Wawancara dengan H. Masin. *op.cit*

⁹ Terence. *op. cit.* hlm. 126.

¹⁰ Ramadhan, *op. cit.* hlm. 200-201.

¹¹ Krisna. *op. cit.* hlm. 77.

Langkah lokalisasi yang ditempuh oleh Ali Sadikin bisa dianggap sebagai upaya yang paling mungkin ditempuh oleh pemerintah. Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk memperlakukan para pekerja seks komersil ini dengan lebih layak lagi. Misalnya saja memberi mereka pekerjaan atau memulangkan mereka ke kampung halamannya.

Menempatkan lokalisasi di Kramat Tunggak juga menimbulkan kesan bahwa pemerintah menyediakan tempat hiburan bagi para pekerja di pelabuhan dan wilayah sekitarnya. Para tamu seperti berada di atas angin ketika datang ke Kramat Tunggak mereka memiliki banyak pilihan. Ke depannya, semakin banyak tamu yang datang. Nantinya, sulit bagi para anak asuh¹² untuk kembali ke masyarakat dan menjalani hidup normal karena mereka terlanjur mudah mendapatkan uang di dalam Kramat Tunggak.

Satu hal yang pasti menyingkirkan mereka dari Kramat Tunggak adalah seleksi alam, yakni ketika usia mereka sudah lanjut dan tamu mulai sepi. Situasi ini sesuai dengan pernyataan H. Masin¹³ bahwa kebanyakan dari anak asuh yang keluar dari Kramat Tunggak adalah mereka yang diperistri oleh tamu mereka. Sementara, mereka yang keluar dengan kemauan sendiri cenderung untuk kembali lagi ke Kramat Tunggak karena gagal hidup mandiri. Hal ini mungkin mereka telah terlena karena begitu mudahnya mendapatkan uang di Kramat Tunggak. Tatkala mereka mencoba kembali ke masyarakat, mereka tidak mampu bersaing

3.1.2. Pemilihan Kramat Tunggak

Kramat Tunggak adalah sebuah wilayah yang terletak dekat dengan Tanjung Priok Jakarta Utara. Penamaan Kramat Tunggak tidak lepas dari keberadaan Prasasti Tugu di wilayah tersebut. Prasasti dari zaman Tarumanegara tersebut oleh orang-orang Kreol dinamakan Tugu, namun masyarakat Jakarta menyebutnya tunggak. Kemudian, karena wilayah tersebut dianggap keramat,

¹² Anak asuh adalah sebutan untuk para pekerja seks komersil di Kramat Tunggak sementara para mucikarinya disebut pengasuh. Penamaan ini seolah ingin menunjukkan bahwa Kramat Tunggak ingin lebih dikenal sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi ketimbang tempat lokalisasi.

¹³ Wawancara dengan H. Masin *op.cit.*

wilayah ini dinamakan Kramat Tunggak.¹⁴ Pada masa itu, masyarakat sekitar menyebut wilayah ini sebagai tempat jin buang anak oleh¹⁵, suatu ungkapan untuk wilayah yang jarang dijajah manusia. Dalam perkembangannya, istilah Kramtung (akronim dari Kramat Tunggak dan juga mengacu pada lokalisasi) juga populer di masyarakat.

Sebelum dijadikan tempat lokalisasi, wilayah Kramat Tunggak berupa rawa, sawah, dan kebun. Letaknya pun terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk. Data ini dibenarkan oleh H. Masin yang ketika pertama kali mendapat tempat di Kramat Tunggak, ia harus berulang kali menguruk tanah berupa rawa yang ia peroleh dari pemerintah.¹⁶ Tanah yang dulunya berupa rawa memang acapkali mengalami penurunan.

Meski jauh dari pemukiman pada umumnya dan tanahnya berupa rawa, sawah, dan kebun, wilayah Kramat Tunggak bukan sama sekali tidak berpenghuni. Sawah dan kebun tersebut tentu ada yang memiliki. Pendapat ini didukung oleh kesaksian Bapak Syamsudin yang kerap mengunjungi temannya di wilayah Kramat Tunggak sebelum Lokalisasi berdiri. Dilanjutkan olehnya bahwa temannya yang bernama Salmah memiliki kebun buah-buahan di sana.¹⁷ H. Masin pun tidak membantah tentang keberadaan pemukiman sebelum berdirinya Lokalisasi. Hanya saja pemukiman di sana masih jarang dan jarak terdekat dengan lokalisasi adalah sekitar 200 meter. Kemungkinan, pemukiman tersebut adalah bangunan semi permanen alias gubuk-gubuk liar yang memang menjadi salah satu permasalahan Jakarta waktu itu.

Terlepas dari masalah terpencil atau tidak serta ada pemukiman atau tidak, letak Kramat Tunggak yang dekat dengan pesisir tidak dapat terbantahkan. Wilayah ini dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok, Cilincing, dan Marunda. Dengan demikian, wajar bila muncul anggapan bahwa lokalisasi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beraktivitas di pelabuhan dan pesisir.

¹⁴ Ridwan Saidi. *Profil Orang Betawi: Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: Gunara Kata, 2004. hlm. 5.

¹⁵ Krisna, *op. cit.* hlm. 170. Lihat pula Ramadhan *op. cit.* hlm. 200.

¹⁶ Wawancara dengan H. Masin. *op.cit*

¹⁷ Wawancara dengan Syamsudin (usia 61 thn), anggota remaja mesjid, pada 13 Mei 2011 di Jakarta.

Pelaut-pelaut yang berada lama di perairan luas, tentu, membutuhkan sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Kemudian, para pekerja di pelabuhan biasanya adalah para kaum urban yang jauh dari pasangan hidupnya juga memiliki kebutuhan yang sama. Kondisi ini yang menjadi salah satu pertimbangan penempatan lokalisasi prostitusi di Kramat Tunggak: terpencil tetapi dekat dengan pelabuhan yang notabene salah satu tempat yang kegiatan ekonominya hampir tidak pernah redup. Sebagai akses menuju Lokalisasi Kramat Tunggak, pemerintah membuat Jalan Kramat Jaya yang menghubungkan wilayah Koja dengan wilayah Semper yang memotong di Lokalisasi Kramat Tunggak.

Di sisi yang lain, pemerintah memiliki pandangan berbeda menempatkan lokalisasi di wilayah Jakarta Utara. Menurut, pendataan tahun 1969¹⁸, kuantitas pekerja seks komersil di Jakarta Utara paling banyak dibandingkan dengan wilayah lain di Jakarta. Catatan ini bisa disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi di Jakarta Utara sehingga menimbulkan permintaan lebih terhadap praktek prostitusi. Tercatat sebanyak 1.668 orang pekerja seks komersil dengan 348 mucikari tersebar di 13 lokasi dalam 9 kelurahan di Jakarta Utara. Tempat-tempat tersebut membaaur dengan masyarakat. Kesembilan kelurahan tersebut ialah Cilincing, Kalibaru, Koja Utara, Pejagalan, Pademangan, Penjaringan, Tugu, Semper, serta Legoa.¹⁹ Demi melancarkan tujuan lokalisasi Kramat Tunggak, pada 1971 pemerintah menyatakan bahwa praktek prostitusi dilarang di keenam kelurahan yang disebutkan awal melalui SI Gubernur No. Ca.7./1/32/71. Kemudian disusul tiga wilayah berikutnya dengan SI Walikota Jakarta Utara No.8/Intr/DU/72 dan SI Gubernur No.7/2/3/1972 sebagai landasan hukumnya pada 1972.²⁰ Aturan-aturan tersebut dikeluarkan untuk mempertegas sikap pemerintah dalam memindahkan praktek prostitusi di kesembilan kelurahan tersebut. Upaya sosialisasi agar mereka pindah ke lokalisasi yang telah disediakan oleh pemerintah dirintis sejak 1969.

¹⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Jakarta Utara dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. *Survei dan penelitian dampak Sosial Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak Terhadap Lingkungan Sekitarnya*. Jakarta, 1987. hlm. 13.

¹⁹ Terence. *op. cit.* hlm. 35.

²⁰ *Ibid.* hlm. 126.

Ditinjau dari sisi lain, keputusan pemerintah sampai menerbitkan surat keputusan yang melarang praktek prostitusi di sembilan kelurahan di Jakarta Utara bisa dimaknai bahwa masih ada para pelaku prostitusi yang menjalankan usahanya di luar Kramat Tunggak. Kenakalan ini dipandang pemerintah perlu ditertibkan oleh sebuah payung hukum. Sayangnya, sejauh ini penulis belum menemukan pelarangan yang sama di wilayah lain seperti Jakarta Timur, meski di luar ruang lingkup tulisan ini. Dengan demikian, timbul kesan bahwa pemerintah seolah hanya ingin menertibkan praktek prostitusi di wilayah Jakarta Utara. Hal ini dibenarkan oleh H. Masin. Menurutnya, Kramat Tunggak adalah lokalisasi yang disediakan pemerintah untuk wilayah Jakarta Utara saja. Tentu ini semakin menggiring opini kearah penertiban praktek prostitusi di wilayah Jakarta Utara saja. Mereka yang bukan berasal dari Jakarta Utara masuk ke Kramat Tunggak biasanya karena terjaring razia petugas.

Sikap tebang pilih ini juga semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah lebih dominan menciptakan hiburan bagi para pekerja di sekitar pelabuhan di Jakarta Utara ketimbang melakukan pembenahan terhadap para pekerja seks komersil yang berseliweran di berbagai tempat di Jakarta. Argument ini semakin kuat dengan pernyataan H. Masin bahwa tempat prostitusi Kali Jodo di Jakarta Barat masih tetap ada meski Kramat Tunggak telah beroperasi. Tidak menutup kemungkinan masih ada tempat prostitusi lain yang masih hidup meski Kramat Tunggak telah beroperasi. Salah satu titik prostitusi di Jakarta yang akrab di masyarakat dan tetap ada ketika Kramat Tunggak telah berdiri adalah Boker di Cijantung.²¹

3.2. Fisik dan Struktur Kramat Tunggak

Luas Lokalisasi Kramat Tunggak ditetapkan seluas 20 ha berdasarkan SK Walikota Jakarta Utara No. 27/SKPTS/II-4/DU/72. Persiapan pendiriannya dilakukan sejak tahun 1969 dengan membentuk proyek penanggulangan masalah pekerja seks komersil. Pendirian bangunan mulai intensif pada tahun 1971 menjelang peresmianya. Bangunan yang diperuntukan bagi praktek prostitusi dibedakan menjadi dua. Pertama adalah tipe TU-5 dengan luas 8m x 15m. Kedua

²¹ Krisna. *op. cit.* hlm. 93.

adalah tipe TU-8 dengan luas 10m x 20m.²² Pada 1971 jumlah bangunan TU-5 berjumlah delapan puluh buah bangunan dan bangunan TU-8 berjumlah empat belas bangunan. Tanah yang digunakan untuk bangunan tersebut mencapai 6,2 ha. Penempatan atau pemilihan pengasuh terhadap tipe bangunan yang disewa tergantung kekuatan modal dan jumlah anak asuh yang ia bawa.

Menurut H. Masin,²³ yang merupakan salah satu pengasuh di Kramat tunggak, para pengasuh yang menempati Kramat Tunggak hanya diberikan tanah kosong oleh pemerintah. Tanah tersebut telah disiapkan tata letaknya sehingga para pengasuh mendirikan bangunan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni kavling-kavling yang dibedakan menjadi dua tadi. Perlu ditekankan bahwa para pengasuh membangun sendiri tempat usahanya sementara tanah yang diperoleh dari pemerintah adalah tanah yang disewakan.

Masih menurut H. Masin,²⁴ para pengasuh dan anak asuhnya mulai menempati Lokalisasi Kramat Tunggak pada 1970. Hal ini sesuai dengan landasan hukumnya yang baru dikeluarkan pada April 1970. Saat itu, pengasuh dan anak asuhnya masih terbatas. Dalam arti, mereka yang pindah pertama kali berasal dari tempat-tempat prostitusi di wilayah sekitar Jakarta Utara seperti Pela-Pela, Bendungan, Kalibaru, dan Koja Lama. Tempat praktek H. Masin sendiri sebelumnya di Kalibaru.

Meski masih dalam satu lokalisasi namun penghuni Kramat Tunggak memiliki klasifikasi sendiri terhadap bangunan yang ada di dalam, selain berdasarkan luas yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka membedakan bangunan lokalisasi menjadi dua pula, yakni kompleks lama dan kompleks baru.²⁵ Komplek lama adalah bangunan yang pertama kali dibangun oleh para penghuni awal di tahun 1970-an. Seiring semakin bertambahnya penghuni lokalisasi, bangunan yang didirikan bertambah secara bertahap. Bangunan ini yang dinamakan oleh penghuni lokalisasi sebagai kompleks baru. Penghuni kompleks baru ini adalah para pengasuh dan anak asuhnya yang baru pindah, biasanya dari

²² Krisna. *op. cit.* hlm. 80.

²³ Wawancara dengan H. Masin, *op.cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

luar Jakarta Utara, dan juga pengasuh dan anak asuhnya yang terjaring razia. Walaupun dibedakan penyebutannya menjadi kompleks lama dan kompleks baru, keduanya tidak terpisah. Keduanya masih dalam satu lokalisasi dan tidak ada batasan. Dengan berdirinya kompleks baru ini, maka luas lokalisasi yang ada bangunan di atasnya bertambah menjadi 11,25 ha pada 1978.²⁶ Apabila dibandingkan dengan luas tanah lokalisasi secara keseluruhan yang mencapai 20 ha, berarti lebih dari setengahnya digunakan untuk bangunan para pengasuh.

Saat pertama kali pindah, H. Masin menuturkan bahwa bangunan yang didirikan oleh para pengasuh masih berupa anyaman bambu atau bilik. Sementara pembatas lokalisasi dengan dunia luar terbuat dari seng. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan zaman, anyaman bambu telah berganti menjadi tembok dan pembatas lokalisasi dengan dunia luar juga mengalami perubahan serupa. Kemudian, karena luas kavling telah ditetapkan oleh pemerintah, pembangunan kavling hanya bisa dilakukan secara vertikal. Terdapat beberapa kavling yang memiliki dua lantai. Kondisi ini tergantung kekuatan modal pengasuh dan juga jumlah anak asuhnya. Tiap pengasuh rata-rata membawahi sepuluh anak asuh.

Tiap-tiap pengasuh yang memiliki masing-masing satu kavling berupaya menata kavlingnya semenarik mungkin. Pada sebagian kavling terdapat bar yang disertai lantai dansa dan adapula yang memiliki penyanyi atau grup musik untuk menghibur para tamu. Misalnya adalah kavling yang bernama Sparti Bar yang memiliki penyanyi tetap bernama Simon Hukom. Serangkaian hiburan tersebut dimaksudkan agar menimbulkan kesan ramai dan pada akhirnya menimbulkan ketertarikan orang untuk masuk.²⁷ Jumlah bar yang ada tidak jauh berbeda dengan jumlah pengasuh yang ada karena tiap pengasuh memiliki kavling masing-masing yang ke depannya diubah bagian depannya menjadi sebuah bar.

Sparti Bar adalah salah satu kavling yang diobservasi langsung oleh Yuyu Krisna pada 1978.²⁸ Kavling ini dapat dijadikan gambaran bagaimana kondisi kavling di Kramat Tunggak. Sparti Bar memiliki lantai dansa dan puluhan kursi yang memenuhi halaman depan bangunan. Di dalamnya terdapat sepuluh kamar

²⁶ Krisna. *op. cit.* hlm. 80.

²⁷ *Ibid.* hlm. 71.

²⁸ *Ibid.* hlm. 71-72.

lengkap dengan kamar mandi. Di dalam kamar terdapat tempat tidur besi, meja, dan dua buah kursi kayu reot. Selain itu juga terdapat lemari pakaian dengan cermin yang sudah pecah. Di salah satu dinding terdapat jendela ukuran 25cm x 25cm yang tidak pernah terkena sinar matahari. Suasana pengap tentu menghinggapi kamar itu. Kondisi tersebut diperparah dengan bau asap obat nyamuk bakar yang bercampur bau minyak angin. Antara tempat tidur dan kamar mandi hanya dibatasi dengan tirai. Kondisi kamar mandinya juga sangat sederhana. Terdapat sebuah bak kecil penampung air dan sebuah kaleng susu bubuk cap bendera yang karatan yang berfungsi sebagai gayung. Pemilik dari Sparti Bar adalah lelaki yang berasal dari Sulawesi Utara. Anak asuhnya berjumlah sepuluh orang. Tiap anak asuh membayar sewa kamar sebesar Rp. 750 per hari. Apabila kamarnya dipakai, sang anak asuh harus membayar lagi Rp. 500.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas tidak jauh berbeda dengan kavling yang lain karena pada tahun tersebut penghuni Kramat Tunggak masih didominasi oleh mereka yang berasal dari tempat prostitusi di wilayah Jakarta Utara seperti dari Pela-Pela, Kalibaru, dan Koja Lama. Penghuni dari wilayah lain datang berangsur-angsur melalui berbagai macam proses, baik karena terjaring razia petugas atau memang berniat pindah ke Kramat Tunggak.²⁹

Selain bangunan yang terkait dengan transaksi seksual, Kramat Tunggak juga memiliki bangunan lain. Terdapat sebuah Musholah At-Taubah yang terletak di seberang lokalisasi yang digunakan sebagai tempat pemberian pemahaman agama bagi para anak asuh. Di sebelah musholah tersebut, terdapat bangunan Panti Rehabilitasi yang berfungsi sebagai bangunan administrasi Kramat Tunggak. Bangunan tersebut juga berfungsi sebagai tempat pelatihan keterampilan dan pemeriksaan kesehatan bagi para anak asuh.³⁰ Selain itu juga ada 2 buah pos keamanan yang berada di dalam lokalisasi.³¹

Secara struktural, seperti termaktub dalam SK No. 7/1/13/70, Walikota Jakarta Utara bertanggung jawab atas Lokalisasi Kramat Tunggak. Wilayah

²⁹ Wawancara dengan H. Masin. *op.cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara dengan Soeharno (usia 58 thn), mantan satuan keamanan Kramat Tunggak, tanggal 13 Juli 2011 di Jakarta.

kerjanya mencakup penyelesaian masalah tanah lokalisasi, pendirian bangunan, pemindahan penghuni, penertiban, pengamanan, serta pemeliharaan lokalisasi. Walikota Jakarta Utara memainkan peran demikian karena memang letak lokalisasi berada dalam wilayah administrasinya sehingga ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berada dalam wilayahnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Walikota Jakarta Utara dibantu oleh Tim Resosialisasi tingkat walikota. Tim resosialisasi tersebut terdiri atas Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Jawatan Agama serta bidang terkait lainnya. Dinas Sosial bertanggung jawab merencanakan dan mengatur pelaksanaan teknis lokalisasi. Sementara itu, Dinas Kesehatan bertanggung jawab merencanakan dan mengatur pelaksanaan teknis mengenai rehabilitasi fisik. Pada pelaksanaannya, Dinas Kesehatan menunjuk Puskesmas Tugu untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap penghuni lokalisasi khususnya para anak asuh.³² Kemudian, pembinaan mental spiritual menjadi domain Jawatan Agama.

Walikota Jakarta Utara tidak serta merta terjun langsung menangani lokalisasi. Yang berhadapan langsung dengan lokalisasi adalah Pemimpin Panti Pendidikan yang menjadi pengurus harian lokalisasi.³³ Panti Pendidikan sendiri baru dibentuk pada 1971 melalui Surat Keputusan Gubernur No. Ca. 7/1/13/32/71 tanggal 28 Juli 1971.³⁴ Berdasarkan SK tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemimpin Panti Pendidikan adalah pemimpin lokalisasi.

Para pengasuh tidak ketinggalan untuk memainkan peran administrasi dalam lokalisasi. Mereka menjalankan peran administrasi sehari-hari dan juga bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta Utara. Peran itu tercantum dalam SK Gubernur No. Ca. 7/1/54/1972, SK Walikota Jakarta Utara No. 64/SKPTS/JU/1972, dan SK Walikota Jakarta Utara No. 104/SKPTS/SD.SOS.JU/73.³⁵ Salah satu peran administrasi tersebut misalnya adalah para pengasuh menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua

³² *Ibid.* hlm. 80

³³ *Ibid.*

³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Jakarta Utara dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. *Survei dan penelitian dampak Sosial Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak Terhadap Lingkungan Sekitarnya*. Jakarta, 1987. hlm. 9

³⁵ Terence. *op. cit.* hlm. 126.

Rukun Warga (RW). Selama kurun waktu penelitian, terdapat delapan RT dan satu RW. Lokalisasi memang hanya memiliki satu RW.³⁶

Salah satu unsur yang juga ada di Kramat Tunggak adalah satuan pengamanan. Mereka bertugas untuk menjaga ketertiban di dalam lokalisasi demi terciptanya kelancaran aktivitas di sana. Satuan keamanan ini kebanyakan berasal dari para preman di sekitar lokalisasi.

3.3. Aktivitas Kramat Tunggak

3.3.1. Sebagai Lokalisasi

Aktivitas utama dari sebuah lokalisasi adalah transaksi seksual antara wanita yang menawarkan jasa seksual dengan sang lelaki yang tertarik untuk menggunakan jasanya dengan alasan apapun. Selain dua aktor di atas, setidaknya ada satu lagi aktor sebuah lokalisasi, yakni mucikari. Mucikari ini adalah “pemilik” dari wanita yang menawarkan jasa seksual sekaligus yang mengatur dan menjalankan usaha ini. Meski ada aktor lain dalam aktivitas sebuah lokalisasi namun mereka sering dianggap sebagai aktor utama.

Sebagai sebuah lokalisasi yang dilegalkan oleh pemerintah, Kramat Tunggak menjadi sebuah tempat usaha yang nyaman bagi para pengasuh maupun anak asuhnya. Mereka tidak perlu khawatir akan razia yang dilakukan oleh petugas dan juga terhindar dari pungutan liar oknum-oknum yang memanfaatkan situasi mereka. Dengan kondisi demikian, aktivitas utama dari usaha ini bisa berjalan dengan lebih lancar.

Jumlah anak asuh yang tercatat saat pertama kali Kramat Tunggak diresmikan pada 1971 berjumlah 300 orang dengan 76 pengasuh.³⁷ Jumlah ini meningkat tajam pada 1978³⁸ menjadi 1.767 anak asuh dengan 231 pengasuhnya. Akan tetapi peningkatan jumlah ini tidak jauh berbeda dengan data pemerintah

³⁶ Wawancara dengan H. Masin. *op.cit.*

³⁷ Terence. *op.cit.* hlm. 31.

³⁸ Meski ruang lingkup penelitian ini sampai tahun 1977 namun data mengenai komposisi penghuni Kramat Tunggak tidak diperoleh sehingga penulis menggunakan data tahun 1978. Data tahun 1978 ini diasumsikan tidak berbeda jauh dengan data tahun 1977 sebab selalu ada penghuni yang keluar masuk lokalisasi setiap waktunya. Bahkan ada yang masuk dan keluar dalam waktu 1 minggu. Wawancara dengan H. Masin.

tentang keberadaan pekerja seks komersil dan juga mucikarinya pada 1969 di 9 kelurahan di Jakarta Utara, yakni 1.668 wanita tuna susila dan 348 mucikari.³⁹ Minimnya penghuni lokalisasi pada awal peresmiannya kemungkinan besar disebabkan para pekerja seks komersil dan mucikari yang terdata masih belum pindah seluruhnya ke lokalisasi. Bisa saja mereka masih dalam proses pemindahan atau bahkan belum mendapatkan lahan di lokalisasi. Kemungkinan terakhir adalah mereka enggan untuk pindah ke Kramat Tunggak.

Pemindahan para pekerja seks komersil dari luar ke dalam lokalisasi dilakukan secara masif pada tahun 70-an. Akan tetapi, komposisi mereka relatif stabil setelahnya. Pada tahun 80-an dan 90-an tercatat jumlah anak asuh di Kramat Tunggak berada di kisaran 2.000 orang.⁴⁰ Selain karena hampir semuanya dipindahkan, anak asuh yang berada dalam lokalisasi juga memiliki batas waktu beroperasi di dalam lokalisasi.

Menurut data pada tahun 1978⁴¹, klasifikasi usia anak asuh adalah 902 orang (51,06%) berusia antara 21-24 tahun, 476 orang (26,31%) berusia antara 17-20 tahun, 389 orang (22,63%) berusia lebih dari 24 tahun. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa anak asuh yang berada di dalam lokalisasi kebanyakan masih muda. Kondisi ini dapat diterima sebab tuntutan permintaan memang menginginkan demikian.

Kebanyakan penghuni Kramat Tunggak buta huruf, yakni 1.156 orang (64,40%). Sementara itu, yang berpendidikan Sekolah Dasar berjumlah 554 orang (31,32%), Sekolah Lanjutan Pertama 53 orang (3,06%), serta Sekolah Lanjutan Atas hanya 4 orang (0,22%). Data ini tidak mengherankan karena sampai sekarang pun masih ada anggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi wanita. Urusan wanita diibaratkan berputar antara dapur, sumur, dan kasur yang dianggap kurang memerlukan pendidikan.

Menurut klasifikasi daerah asal, terdapat 285 orang (15,13%) dari Jawa Timur, 396 orang (21,41%) dari Jawa Tengah, 1,182 orang (63,35%) dari Jawa

³⁹ Krisna. *op. cit.* hlm. 80.

⁴⁰ Terence. *op.cit.* hlm. 31.

⁴¹ Krisna. *op. cit.* hlm. 81.

Barat, serta sisanya, yaitu empat orang (0,11%) dari luar Pulau Jawa. Apabila dikerucutkan lagi, menurut pengakuan H. Masin, wilayah Indramayu menjadi pemasok anak asuh terbesar di Kramat Tunggak yang kemudian diikuti oleh Jepara. Sampai saat ini pun Indramayu populer di masyarakat sebagai wilayah yang banyak wanitanya berprofesi sebagai pekerja seks komersil.

Sebenarnya, tidak semua wilayah di Indramayu menjadi basis pemasok pekerja seks komersil. Dari 19 kecamatan, hanya 7 kecamatan yang menjadi pemasok pekerja seks komersil ke berbagai daerah lain. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Gabus Wetan, Cikedung, Jati Barang, Karang Ampel, Losarang, Kandanghaur, dan Anjatan.⁴² Ditilik lebih lanjut, kecamatan-kecamatan tersebut dekat dengan jalan raya di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa sehingga akses ke daerah lain termasuk ke Jakarta menjadi lebih mudah. Akan tetapi apabila akses ke daerah lain dijadikan acuan utama maraknya pekerja seks yang berasal dari Indramayu, pendapat ini lemah karena wilayah lain di Jawa barat pun memiliki akses yang sama untuk ke Jakarta.

Kultur dan kondisi Indramayu menjadi alasan lain maraknya pekerja seks komersil yang berasal dari sana. Indramayu telah lama dikenal sebagai daerah miskin dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Kemudian, rata-rata penduduknya menikah pada usia muda sementara tingkat perceraianya juga tinggi.⁴³ Karena perceraian, banyak ibu muda yang harus harus menafkahi anak dan juga keluarganya. Dengan kemampuan dan keterampilan yang minim, terjun ke dunia prostitusi menjadi pilihan yang paling mungkin.

Terence Hull menggunakan pendekatan spesialisasi regional berdasarkan pengalaman masa lalu untuk menganalisa maraknya pekerja seks komersil yang berasal dari Indramayu.⁴⁴ Menurutnya, fenomena maraknya pekerja seks yang berasal dari Indramayu tidak lepas dari perempuan-perempuan Indramayu yang dikenal sebagai pemasok perempuan pelayan seks ke kalangan Istana Cirebon. Citra seperti ini, dan juga faktor lain yang telah diuraikan, menciptakan spesialisasi bagi Indramayu sebagai daerah pemasok pekerja seks. Spesialisasi

⁴² Terence. *op.cit.* hlm. 91.

⁴³ *Ibid.* hlm. 89.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 70-71.

daerah prostitusi seperti ini dapat dikomparasikan dengan peran daerah lain dalam memasok tenaga kerja dengan okupasi berbeda seperti buruh bangunan atau tukang becak.

Lebih lanjut Terence Hull menjelaskan bagaimana spesialisasi tersebut tetap berlangsung dengan mengutip tesis Gustav Papanek.⁴⁵ Papanek menjelaskan kekuatan spesialisasi suatu daerah dalam pekerjaan tertentu. Pertama, pekerja yang sudah lebih dulu lebih suka memberi pekerjaan kepada saudara, keluarga, atau teman lainnya dalam kelompok yang sama. Kedua, pekerja yang sudah lebih dulu cenderung mengalokasikan pekerjaan atau kekuasaan kepada kelompok yang punya latar belakang kehidupan yang sama. Tesis ini sesuai dengan pernyataan H. Masin bahwa beberapa anak asuh di Kramat Tunggak mengajak kenalannya ke Kramat Tunggak untuk menjadi anak asuh setelah mereka pulang kampung. Terence melanjutkan bahwa mereka yang pulang kampung seperti efek demonstratif yang secara nyata menunjukkan kekayaannya sebagai lambang kemakmuran dan sebagai bukti keberhasilan yang dicapainya dalam pekerjaan.

Beralih pada pelayanan yang diterima anak asuh dalam lokalisasi. Para anak asuh mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala⁴⁶, yakni setiap sebulan sekali. Pemeriksaan tersebut berupa pemeriksaan darah dan air seni. Langkah ini dilakukan guna menghindari terjangkitnya penyakit kelamin, baik bagi anak asuh maupun pelanggan. Pemeriksaan ini menjadi tanggung jawab Puskesmas Tugu yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para penghuni lokalisasi, termasuk anak asuh, tidak terlalu sulit mendapatkannya. Para tukang kredit, penjual makanan, dan yang lainnya menghampiri mereka ke dalam lokalisasi⁴⁷ atau ada juga yang berada di luar. Kondisi ini tidak lepas dari dibukanya Jalan Kramat Jaya yang menghubungkan Koja dengan Semper yang memotong di Lokalisasi Kramat Tunggak. Selain memudahkan para pelanggan, dibukanya akses ke Kramat Tunggak juga menarik masyarakat untuk ikut terlibat dalam

⁴⁵ Terence Hull mengutip dari buku Gustav Papanek yang berjudul *The Poor of Jakarta*. *Ibid.*

⁴⁶ Krisna. *op. cit.* hlm. 80.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 75.

kegiatan ekonomi di sana, khususnya menyediakan kebutuhan penghuni lokalisasi.

Pelanggan yang datang ke Kramat Tunggak berasal dari berbagai kalangan. Mengingat letaknya yang dekat dengan pelabuhan dan wilayah pesisir, kebanyakan pelanggan Kramat Tunggak berasal dari masyarakat sekitar pelabuhan, baik pekerja pelabuhan maupun masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, bukan mereka saja yang menikmati keberadaan Kramat Tunggak. Pelanggan yang datang menggunakan mobil mewah dengan merk Honda Civic, Toyota Hardtop, Landrover juga ada yang menyambangi Kramat Tunggak. Tidak ketinggalan pula mobil sedan berplat merah menambah variasi pelanggan Kramat Tunggak.⁴⁸

Kedatangan pelanggan dari kalangan menengah ke atas bahkan sampai pegawai pemerintahan menjadi suatu hal yang unik. Hal ini disebabkan hampir semua anak asuh yang berada di Kramat Tunggak berasal dari pinggir jalan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Kramat Tunggak adalah lokalisasi kelas bawah. Dari kendaraan yang mereka tunggangi bisa dipastikan mereka berasal dari kalangan berada sehingga seharusnya mereka bisa mencari wanita penghibur yang lebih baik. Ada kemungkinan mereka datang ke Kramat Tunggak karena memiliki pilihan lebih banyak. Selain itu, wanita Kramat Tunggak relatif lebih bersih dari pada wanita tuna susila lain karena mereka diperiksa kesehatannya secara berkala.

Para pelanggan Kramat Tunggak harus mengeluarkan kocek sebesar Rp. 3.000 sampai Rp. 4.000 untuk kencana kilat atau *short time*.⁴⁹ Sebagai perbandingan, rata-rata tarif pekerja seks komersil di Boker Cijantung pada saat yang sama berkisar di angka Rp. 5.000 per kencana kilat.⁵⁰ Apabila pelanggan menghendaki lebih lama, harga bisa dinegosiasikan dengan sang wanita. Perbedaan harga tersebut biasanya berdasarkan kelas sang wanita: bisa dari usia, kecantikan atau yang lainnya, tergantung selera para tamu.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁹ Alison Murray. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta*. Jakarta: LP3ES, 1994. hlm. 125.

⁵⁰ Krisna. *op.cit.* hlm. 98.

Kehidupan di Kramat Tunggak mulai muncul saat hari mulai gelap, sekitar pukul 08.00 dan berakhir sekitar pukul 01.00 dini hari. Dalam kurun waktu tersebut, situasi Kramat Tunggak lebih hidup. Alunan lagu dari bar-bar yang ada di sana diperdengarkan keras-keras. Hiasan lampu kelap-kelip menambah kesan meriah di tiap bar. Sementara, pedagang makanan seperti bakso, ketoprak, gorengan, martabak, es buah dan yang lainnya menghiasi gang-gang yang ada di Kramat Tunggak.

Tindak kriminal juga kerap muncul di Kramat Tunggak. Maklum, mereka yang menjadi tamu biasanya hilang kesadaran karena mengonsumsi minuman keras. Pembunuhan terhadap anak asuh menjadi salah satu tindak kriminal yang umum terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh tamu yang tidak mau bayar atau tamu yang cemburu terhadap salah seorang anak asuh. Pembunuhan ini sering tidak terdeteksi karena suasana rumah bordil yang bising oleh suara musik.⁵¹

Bentuk keonaran lain, seperti dituturkan Soeharno,⁵² adalah tamu yang tidak mau membayar minuman di bar dan kemudian membuat keributan. Oknum dari militer pernah melakukan tindakan. Bisa dikenali dari oknum militer karena mereka berseragam saat masuk lokalisasi. Langkah yang ditempuh oleh satuan keamanan Kramat Tunggak biasanya adalah dengan menghubungi kesatuannya agar mereka bisa dijemput oleh kesatuannya.

Sebenarnya, tamu berseragam dinas memang dilarang memasuki Kramat Tunggak. Larangan ini pun berlaku bagi anak-anak dan hewan peliharaan. Bahkan pada 1991 pedagang keliling dilarang memasuki Kramat Tunggak.⁵³ Pelarangan para pedagang keliling ini membuat mereka mengkal di sekitar lokalisasi. Ini bisa semakin menambah pemukiman di sekitar lokalisasi.

Mendekatnya pemukiman di sekitar Kramat Tunggak menjadi salah satu dampak buruk dari keberadaan Kramat Tunggak. Dikatakan dampak buruk karena pemilihan daerah Kramat Tunggak yang terpencil dimaksudkan agar pengaruh

⁵¹ Wawancara dengan Soeharno (usia 58 thn), mantan satuan keamanan Kramat Tunggak, tanggal 13 Juli 2011 di Jakarta.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Krisna. *op.cit.* hlm. 127.

buruk prostitusi tidak menyebar ke masyarakat. Masalah penduduk yang mendekati ke Kramat Tunggak sepertinya kurang bisa diantisipasi pemerintah daerah DKI Jakarta. Bahkan, Ali Sadikin malah menyalahkan masyarakat yang mendekati dan mendirikan pemukiman di sekitar Kramat Tunggak.⁵⁴ Mendekatnya pemukiman ke arah pusat perekonomian adalah wajar. Apalagi penghuni Kramat Tunggak juga memiliki kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Mungkin ini adalah salah satu kekurangan dari konsep Lokalisasi Kramat Tunggak.

3.3.2. Sebagai Rehabilitasi dan Resosialisasi

Pada prinsipnya, Lokalisasi Kramat Tunggak hanya untuk sementara. Dengan kata lain, Kramat Tunggak adalah suatu proses dari upaya pemerintah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktek prostitusi. Demi mewujudkan hal tersebut, tidak hanya transaksi seksual yang ada dalam lokalisasi. Para anak asuh dipersiapkan kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Caranya adalah dengan pelaksanaan program rehabilitasi dan resosialisasi terhadap anak asuh.

Program rehabilitasi terhadap anak asuh dilakukan dengan memulihkan kembali keadaan fisik dan psikis anak asuh. Tidak ada yang tahu kondisi fisik, dalam hal ini kesehatan, baik atau tidak ketika pertama kali masuk lokalisasi. Kemudian, mereka ini pastinya gonta-gantinya pasangan saat menjalankan profesinya. Situasi ini menempatkan mereka kepada posisi yang rawan terjerat penyakit menular. Dari sisi psikis, tentu mereka memiliki masalah. Dengan memutuskan untuk terjun ke dunia prostitusi sedikitnya menggambarkan situasi psikis mereka yang lemah. Yang mungkin lebih mengkhawatirkan adalah apabila mereka sudah merasa nyaman dengan profesi yang telah dijalannya ini. Kondisi para anak asuh yang sedemikian rupa akan direhabilitasi dalam Kramat Tunggak.

Wujud dari rehabilitasi fisik adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi para anak asuh. Tiap anak asuh menjalani pemeriksaan rutin agar terjaga kesehatannya dan terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit kelamin. Peran ini diemban oleh Puskesmas Tugu yang bertanggung jawab

⁵⁴ Ramadhan K.H. *Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995. hlm. 24.

kepada Dinas Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan tiap satu bulan sekali. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan air seni dan darah.

Segi mental juga perlu mendapatkan pembinaan. Bentuk dari pembinaan mental yang ada dalam Lokalisasi Kramat Tunggak adalah dengan mendekatkan mereka kepada penciptanya. Untuk itu, kegiatan kerohanian dilakukan tiap seminggu sekali. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menyadarkan mereka bahwa profesi yang mereka jalankan tidak sesuai dengan ajaran agama. Peran ini dijalankan oleh Jawatan Agama. Akan tetapi, bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan dakwah secara perorangan dipersilahkan.⁵⁵

Fisik dan mental para anak asuh memang mendapat pembinaan dalam lokalisasi namun mereka juga memerlukan bekal untuk kembali ke masyarakat. Bekal yang dimaksud adalah keterampilan yang dapat mereka andalkan untuk bertahan hidup. Sisi seperti ini juga mendapat perhatian dari pengurus lokalisasi. Mereka menyiapkan beberapa pelatihan keterampilan untuk dijalani para anak asuh. Langkah ini adalah sebagai wujud peran Kramat Tunggak sebagai tempat resosialisasi. Berhubung sasaran yang dituju adalah kaum wanita, keterampilan yang disiapkan adalah keterampilan yang biasanya dimiliki kaum wanita. Beberapa pelatihan keterampilan yang diajarkan kepada para anak asuh di Kramat Tunggak antara lain menjahit dan menganyam.⁵⁶

Dalam kurun waktu 1971 sampai 1978, jumlah anak asuh yang telah dikembalikan ke masyarakat dari Kramat Tunggak sebanyak 1.610 orang.⁵⁷ Di antara mereka tersebut ada yang menikah, yakni sejumlah 481 orang. Biasanya yang memperistri mereka adalah para pelanggan mereka. Kemudian, sejumlah 108 orang disalurkan ke dalam suatu pekerjaan tertentu atau melakukan usaha sendiri. Langkah ini biasanya dijalani oleh mereka yang memiliki cukup tabungan untuk melakukannya. Yang terakhir, sejumlah 102 orang kembali ke kampung halamannya.

⁵⁵ Wawancara dengan Syamsudin. *op.cit.*

⁵⁶ Wawancara dengan H. Masin. *op.cit.*

⁵⁷ Krisna. *op. cit.* hlm. 81.

Meski anak asuh yang keluar dari Kramat Tunggak terbilang cukup banyak namun peran rehabilitasi dan resosialisasi sepertinya belum menjadi fokus dari Kramat Tunggak. Salah satu yang bisa memperkuat argument ini adalah dengan dikeluarkannya SK No.1659/1989 pada 5 Desember 1989 tentang restrukturisasi Panti Rehabilitasi. Di tahun 1991 juga keluar Surat Instruksi Gubernur No.195/1991 tentang pembatasan masa kerja anak asuh maksimal selama 5 tahun atau telah mencapai usia 35 tahun. Kemudian, Surat Instruksi tersebut juga mewajibkan seluruh anak asuh untuk mengikuti program pelatihan.⁵⁸ Keluarnya surat keputusan dan surat instruksi tersebut memberi cerminan bahwa peran rehabilitasi belum berjalan dengan baik di masa sebelumnya. Bahkan bisa diartikan pada masa Gubernur Ali Sadikin Kramat Tunggak lebih fokus untuk melokalisasi para pekerja seks di Jakarta.

Meski sejumlah anak asuh dilaporkan telah dikembalikan ke masyarakat, tidak menutup kemungkinan mereka kembali menggeluti profesi lamanya. Kekhawatiran ini terutama ditujukan kepada mereka yang kembali ke kampung halamannya. Apakah di sana mereka mendapatkan pekerjaan yang bisa menopang kehidupannya? Ternyata kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan. Sebagian besar dari mereka yang meninggalkan Kramat Tunggak akan masuk ke kompleks prostitusi di kota lain.⁵⁹ Kehidupan baru yang dijalani mereka yang menjalankan usaha juga tidak selalu mulus. Beberapa dari mereka ada yang kembali ke Kramat Tunggak karena gagal untuk hidup mandiri di masyarakat.⁶⁰ Soal lain yang mungkin juga menjangkiti para wanita tuna susila adalah *nymphomaniacs* atau kecanduan hubungan seks.⁶¹ Kemungkinan yang lain adalah mereka telah terbiasa hidup enak. Dalam artian mudah mendapatkan uang sehingga enggan untuk berusaha lebih untuk mencari penghasilan.

3.4. Tanggapan Masyarakat

Terlepas dari konsep apapun yang diterapkan di Kramat Tunggak, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah berperan dalam eksistensi praktek

⁵⁸ Terence. *op.cit.* hlm. 127.

⁵⁹ Terence. *op. cit.* hlm. 33.

⁶⁰ Wawancara dengan H. Masin. *op.cit*

⁶¹ Murray. *op. cit.* hlm. 126.

prostitusi di Kramat Tunggak meski hanya sekejap mata. Berangkat dari pernyataan tersebut, satu sisi yang patut diangkat dari pendirian Kramat Tunggak adalah tanggapan masyarakat terhadap pendirian lokalisasi tersebut, khususnya dari kalangan masyarakat Islam. Seperti diketahui, bersentuhan antara lawan jenis yang bukan muhrim dilarang apalagi berhubungan badan. Terlebih, pada masa sebelumnya kelompok Islam, sebagai mayoritas, telah berupaya menjadikan Islam sebagai landasan bernegara, baik secara konstitusional maupun tidak. Kondisi ini setidaknya menggambarkan bahwa ada kelompok Islam yang ingin menerapkan ajaran Islam dalam bernegara. Menghilangnya kelompok seperti itu di permukaan bukan berarti sama sekali kelompok tersebut tidak ada. Meski demikian, dengan latar belakang yang berbeda, bukan tidak mungkin ada yang menyetujui konsep lokalisasi.

Salah seorang yang setuju terkait pendirian Kramat Tunggak adalah K.H. Harun Al-Rasyid, seorang putra Betawi Salemba.⁶² Ia adalah seorang Ketua Bidang⁶³ Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Nahdlatul Ulama periode 1967-1972. Saat itu Bidang Kesra menangani masalah pendidikan, agama, sosial, kesehatan, transmigrasi, tenaga kerja, termasuk menangani veteran. Masalah prostitusi juga menjadi bagian dari Bidang Kesra ini.

K.H. Harun Al-Rayid menyetujui pendirian lokalisasi dengan syarat. Syarat yang dimaksud adalah pendirian lokalisasi bukan merupakan titik akhir. Lokalisasi harus menjadi proses untuk menghapus praktek prostitusi secara tuntas. Ketentuan ini tampaknya terwujud dengan adanya program rehabilitasi dan resosialisasi di Kramat Tunggak. Selain itu, lanjutnya, dengan melokalisasi berarti mengurangi akses pria hidung belang untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil. Mereka yang datang ke Kramat Tunggak hanya mereka yang memang benar-benar ingin melampiaskan hasrat seksualnya. Mereka memiliki keinginan setengah-setengah tentu enggan untuk pergi ke Kramat Tunggak. Apalagi Kramat Tunggak letaknya agak terpencil.

⁶² Wawancara dengan H. Harun Al-Rasyid (usia 68 thn) mantan anggota DPR RI periode 1967-1972, pada 17 Mei 2011 di Depok.

⁶³ Penggunaan istilah Bidang sekarang berubah menjadi Komisi

Bila para pekerja seks komersil ini tidak dilokalisasi, mereka yang memiliki keinginan setengah-setengah menggunakan jasa pekerja seks komersil bahkan tidak sama sekali bisa tergoda. Pendapat ini dilandasi pengalaman K.H. Harun Al-Rasyid selama tinggal di Salemba.⁶⁴ Para pekerja seks komersil di sepanjang jalan Salemba Raya, Kramat Raya, sampai Senen begitu agresif dalam menggigit pelanggan. Dengan inisiatif sendiri mereka duduk di boncengan belakang pada tiap sepeda yang melintas di sepanjang jalan tersebut. Bahkan siswa sekolah pun mendapat perlakuan demikian. Kondisi ini tentu sudah sangat mengganggu, baik terhadap perkembangan mental masyarakat maupun dari sisi keindahan kota.

Kemudian, dengan melokalisasi para pekerja seks komersil penyebaran penyakit menular akibat gonta-ganti pasangan dapat dikurangi. Hal ini disebabkan para anak asuh mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan yang rutin akan menimbulkan rasa aman bagi para anak asuh maupun para tamu. Adapun penyakit kelamin yang populer saat itu adalah sifilis.

Pendapat agak berbeda diungkapkan Bapak Muhammad Suwardi.⁶⁵ Ia menjabat sebagai Bendahara Pemuda Muhammadiyah di tahun 1970-an. Ia adalah pria kelahiran Cirebon yang telah tinggal di Jakarta sejak 1959. Menurutnya, ide dasar dari lokalisasi itu baik, yakni agar para pekerja seks komersil tersebut tidak berkeliaran di jalanan sehingga ia bisa memahami dan menerima ide dasar tersebut. Akan tetapi, ide tersebut tidak mungkin untuk diwujudkan karena masalah prostitusi bukan masalah yang sederhana. Banyak faktor yang menyebabkan manusia terjun ke dunia prostitusi. Dari sekian banyak faktor, faktor ekonomi menjadi alasan yang utama. Alhasil, masih banyak lokalisasi liar di luar Kramat Tunggak. Apabila kondisi perekonomian masyarakat membaik, tentu bisa menekan jumlah manusia yang terjun ke dunia prostitusi. Dengan demikian, Bapak Suwardi menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendirian Kramat Tunggak.

⁶⁴ Wawancara dengan K.H. Harun Al-Rasyid. *op.cit*

⁶⁵ Wawancara dengan Suwardi (usia 76thn), Bendahara Pemuda Muhammadiyah periode 1970-an di Jakarta, tanggal 23 Mei 2011 di Jakarta.

Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat berazakan Islam yang menaungi Bapak Suwardi, juga tidak setuju terhadap pendirian Kramat Tunggak. Menurutnya, hampir semua kalangan agama menolak kebijakan tersebut. Alasannya adalah agama melarang hal tersebut. Mereka yang tidak mengungkapkan sikapnya bukan berarti setuju namun tidak berani atau mungkin percuma. Sikap ini ditempuh karena berkaca dengan langkah pemerintah yang jalan terus dengan legalisasi perjudiannya. Sementara itu kalangan agama yang menolak lokalisasi berupaya untuk menyampaikan aspirasinya dengan menemui pemerintah. Akan tetapi, upaya mereka tidak berdampak banyak. Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai solusi yang berarti untuk mengatasi masalah prostitusi.

Penolakan secara tegas terhadap lokalisasi prostitusi datang dari Bapak Ramlan Mardjoned.⁶⁶ Ia adalah lelaki kelahiran Pontianak yang kemudian menjadi sekretaris pribadi Mohammad Natsir. Sejak akhir 1960-an. Ia aktif sebagai pengurus ranting Muhammadiyah di Kramat Sentiong. Pada tahun 1970 ia menjadi anggota Ikatan Masjid Djakarta⁶⁷ (IMD). Seiring bergantinya IMD menjadi Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) pada 1973, Ramlan Mardjoned menempati posisi baru, yakni sekretaris IKMI.

Menurut Bapak Ramlan, segala sesuatu yang telah jelas dilarang oleh agama tidak bisa dirubah. Itu adalah aturan yang dibuat oleh Tuhan. Apabila ada sesuatu yang belum jelas, baru kemudian dikeluarkan fatwa. Sementara, perzinahan telah jelas dilarang oleh Tuhan. Sudah barang tentu ia menolak ide melokalisasi praktek prostitusi, yang sama saja artinya dengan melegalkan perzinahan. Sebagai bentuk penolakannya, ia berpartisipasi aktif dengan Ikatan Masjid Djakarta menyampaikan aspirasinya ke DPRD DKI Jakarta dan juga Gubernur Ali Sadikin. Keduanya menyatakan akan menampung aspirasi mereka.

⁶⁶ Wawancara dengan Ramlan Mardjoned. *op.cit*

⁶⁷ Ikatan Masjid Djakarta adalah bagian dari Dewan Dakwah Islamiyah. Kegiatan IMD adalah membina para pengurus mesjid agar kegiatan yang dilakukan mesjid dapat berjalan dengan baik. Pada 1973 IMD berubah menjadi Ikatan Masjid Indonesia (IKMI). Beberapa tokoh IKMI adalah K.H. Abdullah Syafi'I dan K.H. Taufiqurrahman.

Sebagai sekretaris pribadi Mohammad Natsir, ia tentu tahu betul sikap Mohammad Natsir. Menurutnya, Natsir memiliki cara yang agak lain dalam menyikapi beberapa kebijakan Ali Sadikin yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang dilakukan oleh Natsir adalah memberikan pemahaman-pemahaman ajaran Islam kepada Ali Sadikin secara perlahan. Hal itu dilakukan karena menurutnya memang hal itu yang harus dilakukan oleh ulama. Seperti pernyataan Natsir yang coba diulangi oleh Ramlan bahwa apabila seorang ulama masuk ke dalam suatu wilayah, ulama tersebut harus membangunnya secara perlahan.

Penolakan berikutnya datang dari seorang anggota remaja mesjid⁶⁸. Ia adalah Syamsudin, seorang anggota remaja mesjid di wilayah Matraman di tahun 1970-an. Ia adalah laki-laki kelahiran Jakarta dengan orang tua yang berasal dari Minang dan Betawi. Sebagai anggota remaja mesjid, ia pernah melakukan kegiatan dakwah di Kramat Tunggak bersama tiga temannya. Menurutnya,⁶⁹ pendirian Kramat Tunggak bukan sebuah solusi. Lanjutnya, melokalisasi berarti menghalalkan perzinahan. Sebagai masyarakat Jakarta, ia menolak pendirian Kramat Tunggak apapun alasannya.

Sekali lagi, pendapat Syamsudin ini memperkuat pendapat Suwardi bahwa kalangan agama tidak berdaya untuk menentang pendirian Kramat Tunggak karena memang tidak memiliki solusi yang lain. Dengan demikian, tentu pemerintah dapat melanjutkan kebijakkannya melokalisasi praktek prostitusi. Sementara kelompok lain mungkin sadar akan posisi mereka yang lemah, tidak mempunyai solusi lain, sehingga mereka memilih diam.

Pendapat Tumirah tentang keberadaan Kramat Tunggak juga perlu diangkat. Ia adalah seorang guru di salah satu STM dan SMEA di Jakarta. Perempuan kelahiran Yogyakarta ini sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 1974.

⁶⁸ Remaja Mesjid adalah perkumpulan yang ditujukan membina pemuda setempat dalam bidang keagamaan dan juga kemampuan lainnya. Aktivitas remaja mesjid marak sampai tahun. Menurut K.H. Harun Al-Rasyid, pemerintah Orde Baru berupaya menghalangi kegiatan ini karena dianggap menyaingi kegiatan pramuka. Dan hasilnya, tidak ada aktivitas remaja mesjid sekarang ini.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsudin. *op.cit*

Menurutnya,⁷⁰ segala sesuatu yang buruk seperti prostitusi harus dilokalisasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat yang lain. Segala sesuatu yang busuk akan lebih mudah dikendalikan bila terkonsentrasi. Sekilas, pendapat ini agak keras. Namun, ia cukup prihatin dengan nasib mereka yang terjerumus dalam dunia prostitusi. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah yang kurang maksimal mensejahterakan masyarakatnya.

Wujud dari penolakan beberapa kalangan tadi tidak berupa turun ke jalan untuk demo. Mereka lebih memilih membuat surat resmi dan menemui anggota DPRD, pemerintah daerah DKI Jakarta, maupun Gubernur Ali Sadikin secara langsung. Institusi terkait menyatakan menampung dan mempertimbangkan aspirasi mereka. Hanya saja penolakan tersebut belum mampu menggoyahkan eksistensi Kramat Tunggak sebab mereka yang menolak tidak mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah prostitusi di Jakarta.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Tumirah (usia 58 thn), salah satu guru STM dan SMEA di Jakarta, pada 3 Juli 2011 di Jakarta.

⁷¹ Wawancara dengan Ramlan dan Suwardi. *op.cit*

BAB IV

PENUTUP

Memasuki tahun 1960-an Jakarta adalah kota yang kelebihan beban. Sebelum Perang Dunia II, Jakarta diproyeksikan oleh pemerintah Belanda untuk menampung 600.000 jiwa. Namun, penduduk Jakarta pada 1969 mencapai 4.273.863 jiwa. Jumlah tersebut terus meningkat hampir tiap tahunnya. Jumlah penduduk yang sekian banyak dan tidak terkendali menimbulkan berbagai permasalahan di Jakarta seperti masalah perumahan, pekerjaan, dan transportasi yang tidak mampu dipenuhi pemerintah dengan baik.

Perkampungan yang kumuh menjadi pemandangan di Jakarta. Kondisinya yang padat membuatnya seperti tidak layak untuk ditempati. Rumah-rumah yang sempit, tidak ada pertukaran udara, sarana air minum yang tidak memadai, sampah yang berserakan, tidak ada saluran pembuangan air, kurang penerangan listrik, serta lingkungan yang banyak nyamuk dan tikus menjadi potret perkampungan di Jakarta.

Laju urbanisasi yang tidak dibarengi kesiapan Jakarta menerimanya berdampak pada pengangguran. Bahkan, mereka yang tidak memiliki sanak saudara di Jakarta menjadi tunawiswa. Mereka ini akhirnya mendirikan tempat tinggal semi permanen yang tidak beraturan di sembarang tempat seperti di bantaran kali.

Kondisi jalan raya sebagai penggerak roda perekonomian setali tiga uang. Saat turun hujan, fisik jalan yang rusak/bolong tergenang air. Sementara dari jumlah panjang jalan juga tidak memadai. 800 km panjang jalan raya Jakarta harus melayani 160.000 kendaraan. Kemacetan menjadi tidak terelakkan. Dengan perbandingan tersebut, kecepatan maksimal yang bisa ditempuh kendaraan rata-rata 5 km per jam.

Ali Sadikin menghadapi kondisi Jakarta yang demikian saat ia mulai menjabat tahun 1966. Dengan gaya kepemimpinannya yang dikenal tegas bahkan keras, ia mulai membangun Jakarta secara perlahan. Rencana Induk yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya dijadikan landasan olehnya untuk membangun Jakarta. Ia tidak ingin membangun Jakarta dengan tambal sulam

melainkan harus menyeluruh. Rencana Induk tepat untuk itu karena pola pembangunannya disiapkan untuk jangka waktu 20 tahun.

Rencana Induk mengatur penggunaan tanah di Jakarta seperti wilayah untuk perumahan, perkantoran, industri, rekreasi, dan yang lainnya. Tujuannya agar tercipta suatu tata kota yang baik. Rencana Induk ini juga memperkirakan penambahan penduduk Jakarta sehingga sarana yang tersedia cukup untuk melayani kebutuhan penduduk Jakarta.

Dana menjadi masalah klasik dalam melakukan pembangunan. Rencana Induk akan menjadi seonggok ide usang bila tidak ada dana yang cukup untuk mewujudkannya. Sebagai kepala daerah, Ali Sadikin melakukan gebrakan-gebrakan dalam mencari sumber-sumber dana baru, di antaranya adalah melegalkan praktek perjudian di Jakarta. Di samping itu, ia juga memaksimalkan sumber-sumber dana yang ada, yakni dengan menerapkan tertib pajak bagi masyarakat. Menjadikan praktek perjudian menjadi isu yang hangat pada masa Gubernur Ali Sadikin karena banyak mendapat tentangan dari kalangan agama. Akan tetapi, Ali Sadikin jalan terus.

Sejalan dengan penyegaran pemasukan daerah, Jakarta mulai melakukan pembangunan demi terwujudnya pelayanan publik yang baik. Terlebih, Jakarta adalah ibukota negara sehingga menjadi cerminan negara. Langkah pembangunan yang dilakukan oleh Ali Sadikin di antaranya adalah melakukan program perbaikan kampung atau dikenal juga dengan Proyek Husni Thamrin. Selain itu, ia juga membangun jalan-jalan raya dan jembatan (*fly over*). Sarana angkutan umum dan sarana pendukungnya tidak ketinggalan. Ia menambah jumlah armada angkutan umum. Dan juga membuat terminal-terminal agar akses di Jakarta lancar. Salah satu terminal yang dibuat pada masa Ali Sadikin adalah terminal Pulo Gadung.

Dari sederet kebijakannya menata Jakarta, masalah prostitusi juga mendapat perhatian. Memang masalah prostitusi menjadi masalah serius. Masalah ini muncul sebagai cerminan dari kondisi ekonomi yang kurang baik. Demi menciptakan suatu keindahan kota, Ali Sadikin memutuskan untuk melokalisasi praktek prostitusi. Tujuannya agar segala aktivitas prostitusi terkonsentrasi di suatu wilayah sehingga tidak mengotori keindahan kota. Kramat Tunggak

kemudian ditetapkan sebagai wilayah yang akan menjalani tugas tersebut. Kramat Tunggak adalah sebuah wilayah di Jakarta Utara.

Pemilihan Kramat Tunggak sebagai tempat lokalisasi prostitusi berbagai pertimbangan dan alasan yang satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan. Menurut survei yang dilakukan pemerintah pada 1969, keberadaan pekerja seks komersil serta mucikarinya paling banyak dibanding wilayah lain di Jakarta, yakni mencapai 348 mucikari dengan 1.668 pekerja seks komersilnya. Berdasarkan data tersebut, pemerintah melokalisasi mereka di wilayah Jakarta Utara. Kemudian wilayah Kramat Tunggak yang dipilih oleh pemerintah. Alasannya adalah letak wilayah Kramat Tunggak yang jauh terpisah dari pemukiman penduduk sehingga diharapkan lokalisasi tidak berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, wilayah Kramat Tunggak juga dekat dengan wilayah pesisir Jakarta. Kedekatan jarak ini memudahkan para pekerja pelabuhan dan pekerja lainnya di pesisir untuk mendapatkan hiburan.

Pelaksanaan pendirian Kramat Tunggak sudah dimulai pada 1969 dengan memberikan sosialisasi kepada para mucikari dan pekerja seks komersil agar mereka pindah ke Kramat Tunggak. Memasuki tahun 1970, mereka mulai proses pemindahan tersebut seiring dengan pelarangan praktek prostitusi di sembilan kelurahan di Jakarta Utara. Setelah menempati Kramat Tunggak, para pengasuh mulai membangun tempat usaha yang mereka sewa tanahnya dari pemerintah. Mereka membangun sendiri bangunan yang akan menjadi tempat mereka mencari nafkah. Rangkaian proses tersebut terus berjalan hingga Kramat Tunggak diresmikan oleh pemerintah pada 1971.

Menurut aturannya, para anak asuh yang akan bekerja di Kramat Tunggak dibatasi usia minimalnya. Lamanya keberadaan mereka di Kramat Tunggak pun dibatasi hingga lima tahun. Akan tetapi, masih ada pelanggaran terhadap aturan tersebut. Segi kesehatan para anak asuh pun mendapat perhatian. Mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebulan sekali. Tujuannya agar mencegah meluasnya penyakit kelamin di antara mereka dan para tamu.

Ali Sadikin tidak begitu saja menciptakan lokalisasi prostitusi. Kramat Tunggak juga memiliki tujuan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi, yang tentunya ditujukan kepada para anak asuhnya. Kegiatan yang ada untuk mencapai

tujuan tersebut antara lain dengan memberikan pemahaman agama yang dilakukan secara rutin. Sebagai bekal para anak asuh bila suatu waktu mereka keluar dari Kramat Tunggak, telah disediakan serangkaian pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan tersebut misalnya adalah menjahit. Selain itu, para anak asuh juga mendapat pendidikan baca tulis.

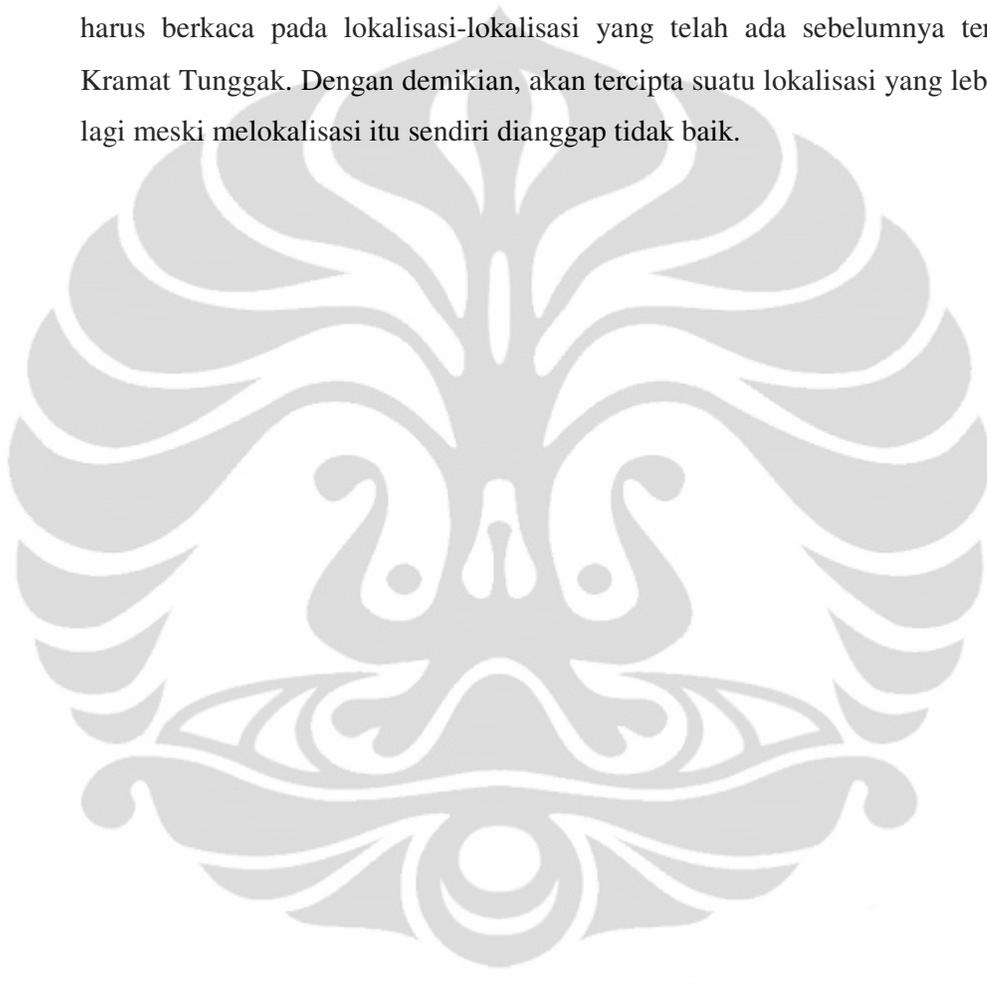
Pendirian Kramat Tunggak mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Mereka yang setuju beranggapan bahwa lokalisasi adalah suatu proses untuk menghilangkan praktek prostitusi secara bertahap. Lokalisasi juga dianggap mengurangi dampak buruk prostitusi bagi masyarakat. Hanya mereka yang benar-benar ingin menggunakan jasa pekerja seks komersil yang akan pergi ke Kramat Tunggak. Mereka yang memiliki setengah-setengah tentu enggan untuk pergi ke Kramat Tunggak.

Sementara itu, mereka yang menolak memiliki argumen beragam. Ada yang beranggapan bahwa sebenarnya ide lokalisasi cukup bagus namun tidak menyelesaikan masalah karena masalah prostitusi adalah masalah yang rumit. Adapula yang berpendapat bahwa Kramat Tunggak adalah praktek legalisasi prostitusi oleh pemerintah yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Kebanyakan dari mereka yang menentang berasal dari kalangan agama. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai solusi yang lain sehingga Kramat Tunggak tetap berjalan.

Hasil penelitian ini tentu masih terdapat kekurangan di sana-sini. Hal ini wajar karena penulis tidak luput dari keterbatasan dan subjektivitas. Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan bagian-bagian yang kurang dari penelitian ini.

Satu dari sekian hal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah sejauh mana efektivitas Kramat Tunggak mengembalikan para anak asuh kembali ke kehidupan yang normal. Seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa Kramat Tunggak juga memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Apakah fungsi tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah anak asuh yang telah pulang ke kampung halamannya sudah benar-benar pulih sehingga tidak kembali lagi ke dunia prostitusi? Atau mereka hanya pindah lokalisasi? Semua ini perlu penelitian lebih lanjut.

Untuk menjawab permasalahan serangkaian pertanyaan di atas tentu tidak mudah. Anak asuh yang pernah singgah di Kramat Tunggak berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Bukan perkara mudah melacak mereka. Mencari jawaban atas serangkaian pertanyaan tadi cukup penting apabila di kemudian hari ada wilayah yang akan menerapkan konsep lokalisasi lagi. Wilayah tersebut tentu harus berkaca pada lokalisasi-lokalisasi yang telah ada sebelumnya termasuk Kramat Tunggak. Dengan demikian, akan tercipta suatu lokalisasi yang lebih baik lagi meski melokalisasi itu sendiri dianggap tidak baik.



BIBLIOGRAFI

Arsip

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. Ca.7/1/70. tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi dan Resosialisasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab

Karya Yang Tidak Diterbitkan

Husmiati, Ratu. *Ali Sadikin dan Pembangunan Jakarta, 1966-1977*. Jakarta: Fakultas Sastra UI, 2002. (Tesis)

Survei dan penelitian dampak Sosial Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak Terhadap Lingkungan Sekitarnya. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Jakarta Utara dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia: Jakarta, 1987.

Buku

Abeyasekere, Susan. *Jakarta a History*. Singapore: Oxford University Press, 1989.

Ali Sadikin: Menggusur dan Membangun. Jakarta: Idayu Press, 1977

Castle, Lance. *Profil Etnik Jakarta (terj)*. Jakarta: Masup Jakarta, 2007.

Damais, Soedarmadji (ed). *Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta: 1945-1966*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta, 1977.

Ingleson, John, "Prostitution in Colonial Java", dalam D. Chaudler dan M.C. Ricklefs. *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia*. Melbourne: Monash University Press, 1986.

Dictionary of Sociology. Philosophical Library: New York, 1944.

Gie, The Liang. *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*. Jakarta: Kota Pradja Djakarta Raja, 1958

- Hardi, Lasmidjah dkk., *Jakarta-ku Jakarta-mu Jakarta-kita*. Jakarta: Yayasan Pencinta Sejarah dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1987.
- Hull, Terence, Endang, Sulistyaningsih, dan Gavin, W. Jones. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya (terj)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- K.H., Ramadhan. (ed). *Bang Ali Demi Jakarta, 1966-1977*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- _____. *Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Krisna, Yuyu. *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Kencana, 2003.
- Lubis, Firman. *Jakarta 1950-an: Kenangan Semasa Remaja*. Depok: Masup Jakarta, 2008.
- _____. *Jakarta 1960-an: Kenangan Sebagai Mahasiswa*. Depok: Masup Jakarta, 2008.
- _____. *Jakarta 1970-an: Kenangan Sebagai Dosen*. Jakarta: Ruas, 2010.
- Murray, J. Alison. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Prayitno, Arrohman., dkk. (ed). *Ali Sadikin: Visi dan Perjuangan Sebagai Guru Bangsa*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
- Saidi, Ridwan. *Profil Orang Betawi: Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: Gunara Kata, 2004.
- Sedyawati, Edi dkk., *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
- Truong, Thanh-Dam. *Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara (terj)*. Jakarta: LP3ES, 1992.

Wirosardjono, Soetjipto (ed). *Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta, 1977.

Wawancara

Wawancara dengan Syamsudin (usia 61 thn), anggota remaja mesjid, tanggal 13 Mei 2011 di Jakarta.

Wawancara dengan H. Masin (usia 59 thn), mantan pengasuh Kramat Tunggak, tanggal 15 Mei 2011 dan 13 Juli 2011 di Jakarta

Wawancara dengan K.H. Harun Al-Rasyid (usia 68 thn), mantan anggota DPR RI periode 1967-1972, tanggal 17 Mei 2011 di Depok.

Wawancara dengan Muhammad Suwardi (usia 76 thn), Bendahara Pemuda Muhammadiyah periode 1970-an di Jakarta, tanggal 23 Mei 2011 di Jakarta

Wawancara dengan Ramlan Mardjoned (usia 68 thn), mantan anggota Ikatan Mesjid Djakarta dan sekretaris pribadi Muhammad Natsir, tanggal 25 Mei 2011 di Jakarta

Wawancara dengan Tumirah (Usia 58 thn), mantan salah satu guru STM dan SMEA di Jakarta sejak tahun 1974, tanggal 3 Juli 2011 di Jakarta.

Wawancara dengan Soeharno (Usia 56 thn), mantan satuan keamanan Kramat Tunggak, tanggal 13 Juli 2011 di Jakarta.

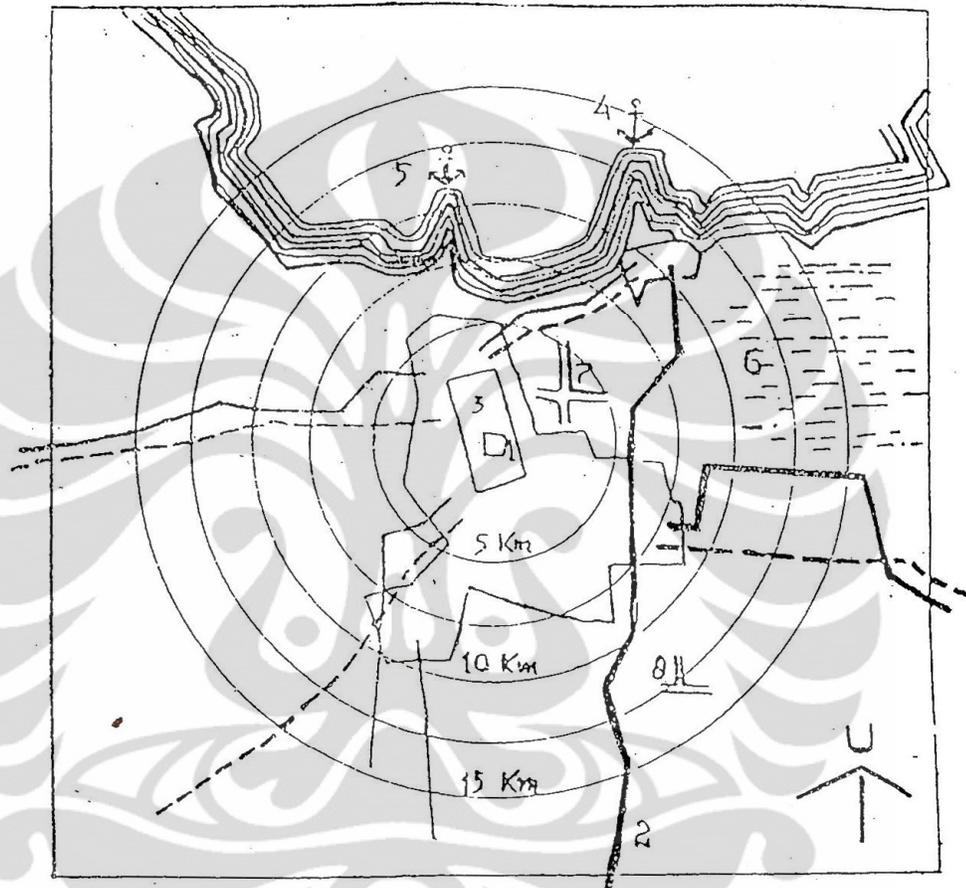
Publikasi Elektronik

Lamijo, "Prostitusi di Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan, 1930-1959: Sejarah dan Perkembangannya", <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=22>, 8 April 2009. Diakses pada 1 Juni 2011.

Sensus Penduduk Jakarta versi Biro Pusat Statistik Jakarta online, <http://bpsdki.go.id>. Diakses pada 1 Juni 2011.

Lampiran 1

DASAR-DASAR PEMIKIRAN PERUNTUKAN TANAH

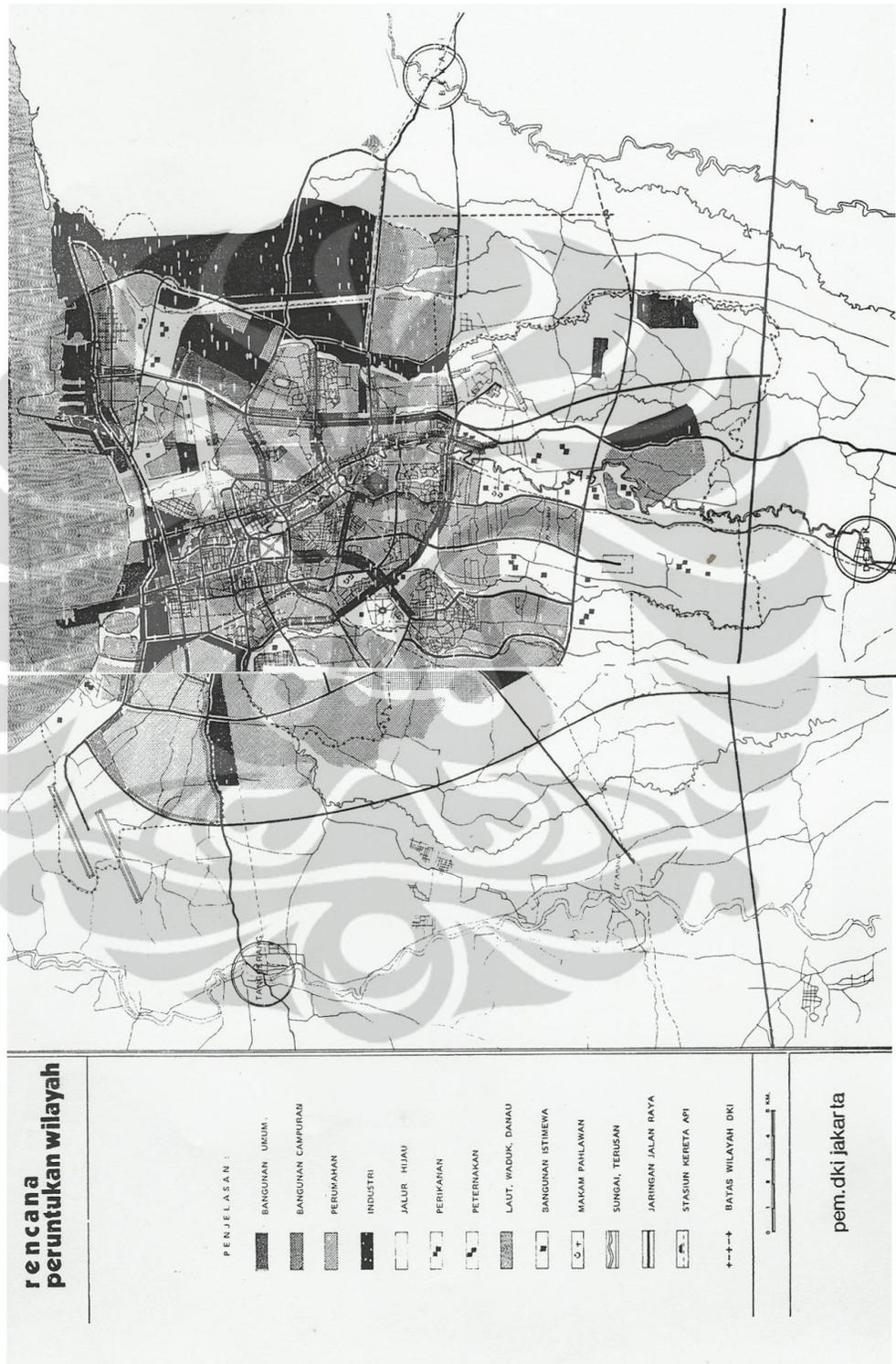


KETERANGAN :

1. Monumen Nasional
2. Djalan Utama
3. Pusat kegiatan kota
4. Pelabuhan Tandjong Priok
5. Pelabuhan Pasar Ikan
6. Rawa - rawa
7. Lapangan Udara Kemajoran
8. Lapangan Udara Tjililitan

Sumber: Rencana Induk Jakarta 1965-1985

Lampiran 2



Sumber: Gita Jaya

Lampiran 3

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA
No.:Ca.7/1/13/70.
tentang
PELAKSANAAN USAHA LOKALISASI DAN RESOSIALISASI
WANITA TUNA SUSILA SERTA PEMBIDANGAN TUGAS DAN
TANGGUNG DJAWAB.

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;

Menimbang : Bahwa untuk mendjamin kelantjaraan pelaksanaan usaha lokalisasi dan resosialisasi wanita tuna-sulila, perlu adanja suatu Team jang merupakan wadah bagi terlaksanaja koordinasi dan synchronisasi antar Instansi dalam melakukan tugasnja disertai adanja pembedangan tugas dan tanggung djawab jang djelas;

Mengingat : 1. Undang2 No.18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintah Daerah jo. Undang2 No.6 tahun 1969 ;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo. Undang2 No.5 tajjun 1969 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

Mendengar : Pertimbangan Anggota B.P.H. jang bersangkutan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Ketentuan tentang pelaksanaan usaha lokalisasi dan resosialisasi wanita tuna-susila serta pembedangan tugas dan tanggung djawab.

B A B I.
Team Resosialisasi.

Pasal 1.

(1) Gubernur KDCI Djakarta membentuk Team Resosialisasi Wanita Tuna-Susila jang terdiri dari :

- a. Anggota BPH bidang Sosial dan Kesehatan.
- b. Direktorat II Pemerintah DCI.
- c. Direktorat III Pemerintah DCI.
- d. Dinas Sosial DCI.
- e. Dinas Kesehatan DCI.
- f. Djawatan Agama DCI.
- g. Instansi2 lain jang ada hubungannja dengan masalah wanita tuna-susila, serta organisasi sosial/perorangan.

(2) Team sebagai dimaksud pada ajat (1) tsb, diatas diketuai oleh anggota BPH. bidang Sosial dan Kesehatan dan merupakan pembantu Gubernur dalam mendjalankan policy resosialisasi wanita tuna-susila.

Pasal 2.

(1) Se-kurang2nja dua bulan sekali Team Resosialisasi mengadakan rapat, untuk keperluan a.l. :

- a. konsultasi ;
- b. penilaian atas pelaksanaan resosialisasi di-wilajah2.
- c. pembahasan tentang masalah2 jang dihadapi dll.

(2) Ketua menentukan dan mengatur hari/tanggal, djam dan tempat diadakannja rapat Team.

R A B . II

Lanjutan

B A B II.Pembidangan tugas dan tanggung djawab anggota Team.Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi tanggung-djawab Team sebagai suatu kesatuan, maka untuk kelantjaran dan ketertiban pelaksanaan tugas kepada masing2 anggota Team diberikan pembidangan tugas dan tanggung-djawab sebagai berikut :

- a. Anggota B.P.H. bidang Sosial dan Kesehatan sebagai Ketua Team ber-sama2 dengan Direktorat III Pemerintah DCI menjusun program kerdja.
- b. Direktorat II merentjanakan pelaksanaan operasi wanita tuna-susila dan germo jang masih berada diluar kompleks lokalisasi.
- c. Dinas Sosial DCI merentjanakan dan mengatur pelaksanaan teknis resosialisasi.
- d. Djawatan Agama DCI merentjanakan dan mengatur pelaksanaan teknis mengenai pendidikan mental keagamaan.
- e. Dinas Kesehatan DCI merentjanakan dan mengatur pelaksanaan teknis mengenai rehabilitasi fisik.

B A B III.Proses pelaksanaan lokalisasi.Pasal 4.

Walikota dengan dibantu oleh Team Resosialisasi tingkat Walikota, merentjanakan, mengatur dan bertanggung djawab tentang pelaksanaan pemindahan para wanita tuna-susila ketempat lokalisasi.

Pasal 5.

Dalam proses pelaksanaan lokalisasi Walikota mengambil langkah2 a.l. sebagai berikut :

- a. Penjelesaian masalah tanah tempat lokalisasi.
- b. Pendaftaran germo dan wanita tuna-susila.
- c. Pelaksanaan pendirian bangunan.
- d. Pelaksanaan pemindahan penghuni.
- e. Penertiban, pengamanan dan pemeliharaan tempat lokalisasi.

Pasal 6.

Penentuan tentang luas kapling, sewa tanah dan bangunan diatur oleh Walikota setempat, dengan sjarat :

- a. Bangunan dibiayai sendiri oleh pihak germo.
- b. Letak bangunan harus disesuaikan dengan planologi Kota.

B A B IV.Proses Resosialisasi.Pasal 7.

Didalam kompleks lokalisasi diadakan pendidikan mental dan kedjuruan serta tempat-tempat konsultasi.

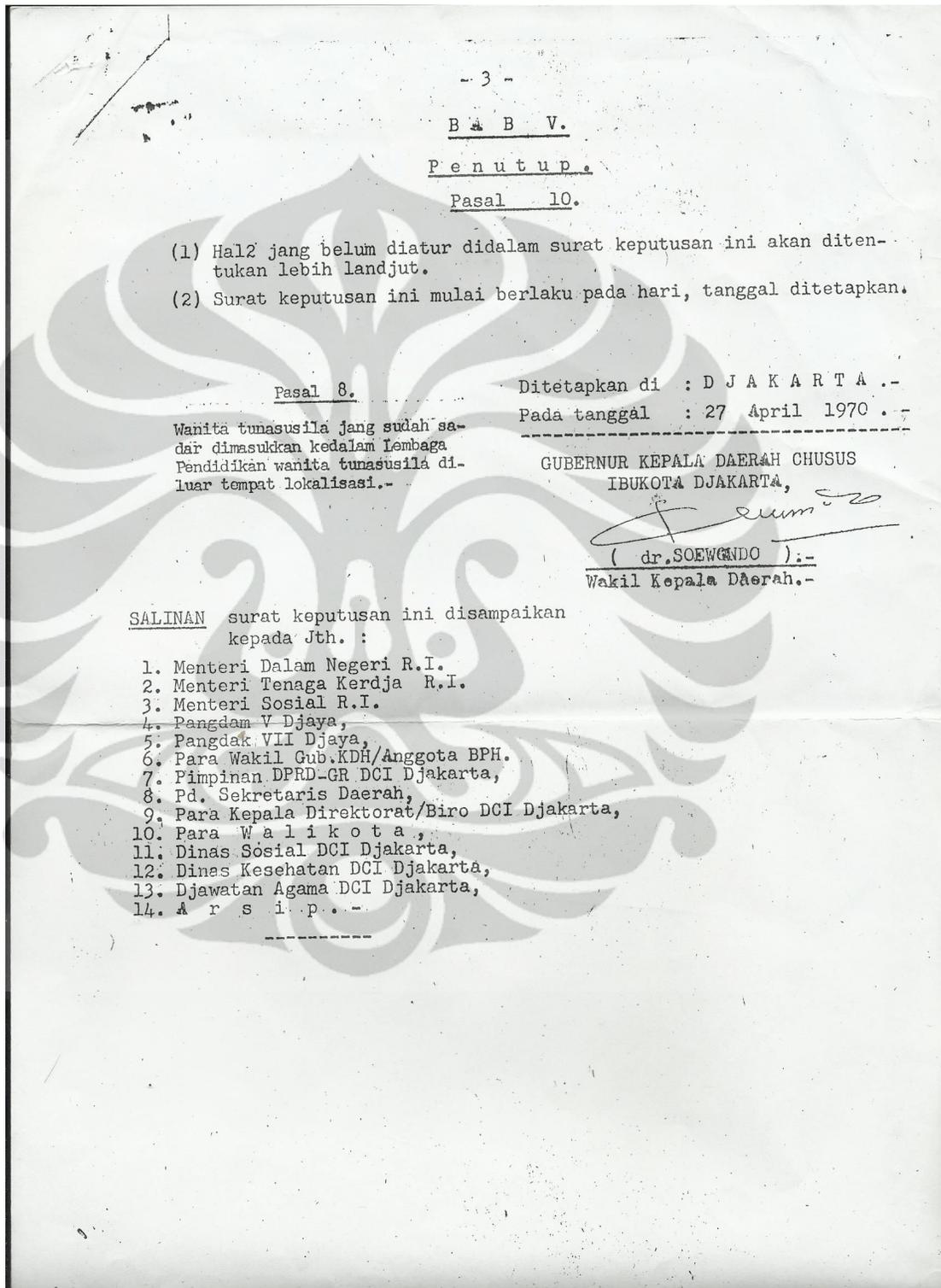
Pasal 8. (Periksa halaman 3)Pasal 9.

Resosialisasi terhadap para wanita tuna-susila dilaksanakan dengan djalan a.l. :

- a. technis perkawinan,
- b. kembali kepada keluarga,
- c. keprojek pekerdjaan tertentu,
- d. Dan lain-lain.

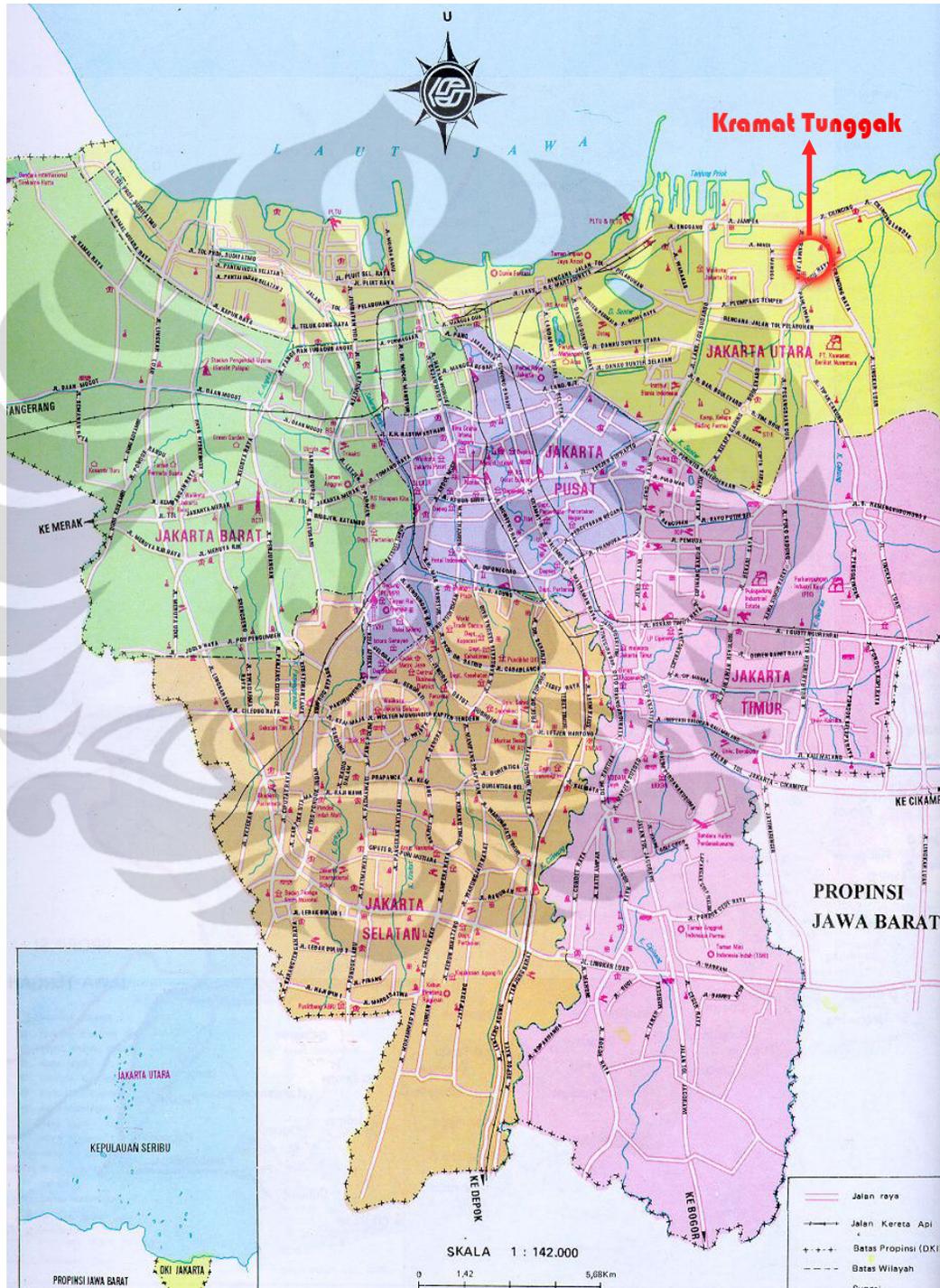
B A B V. ...

Lanjutan



Sumber: Arsip Jayakarta

Lampiran 4: Letak Kramat Tunggak



Lampiran 5: Letak Kramat Tunggak

